

**PENGARUH PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) SUBSIDI DAN INFLASI TERHADAP
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA ZAHRAH TSANI

NIM: G91219065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Annisa Zahrah Tsani, G91219065, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya dari orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Persyaratan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 3 Juli 2023



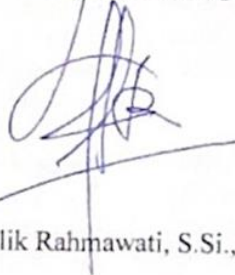
Annisa Zahrah Tsani
NIM: G91219065

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 8 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN INFLASI TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI SURABAYA

Oleh
Annisa Zahrah Tsani
NIM: G91219065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I.
NIP. 198106062009012008
(Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha,
S.E.I., M.S.E.I.
NIP. 201603311
(Penguji 2)
3. Hapsari Wiji Utami, S.E, M.S.E.
NIP. 198603082019032012
(Penguji 3)
4. Debby Nindya Istiandari, M.E.
NIP. 199512142022032002
(Penguji 4)

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 21 Juni 2023



Dr. Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 2005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Zahrah Tsani
NIM : G91219065
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ilmu Ekonomi
E-mail address : annisazht@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi

rumah tangga di Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Oktober 2023

Penulis

(Annisa Zahrah Tsani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kebutuhan akan BBM semakin meningkat tiap tahunnya. Diketahui, BBM jenis pertalite hampir 80% dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan jenis bensin lainnya. Sebagai ibu kota Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki jumlah penduduk dan jumlah pengguna kendaraan bermotor yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Kenaikan pada harga BBM dapat memberikan efek terhadap perekonomian, salah satunya yaitu inflasi. Inflasi tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin menurun sehingga konsumsi masyarakat ikut menurun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berjenis *time series* dengan bersumber dari BPS, Kementerian ESDM, dan Pertamina. Teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda.

Secara simultan, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya. Koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,860 yang berarti bahwa pengaruh perubahan harga BBM subsidi dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya yaitu sebesar 86 persen. Secara parsial, harga BBM subsidi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Variabel inflasi secara parsial memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Inflasi tinggi belum tentu menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, karena masyarakat tetap mengonsumsi barang-barang yang masih dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan teori inelastisitas permintaan yang menyatakan bahwa apabila terdapat perubahan harga pada suatu produk, maka permintaan produk tersebut tidak akan berdampak signifikan.

Perubahan pada harga BBM bersubsidi membuat perekonomian nasional hingga regional seperti Surabaya terganggu. Adapun saran dari peneliti untuk Pemerintah Kota Surabaya untuk tetap menjaga kestabilan tingkat inflasi akibat adanya kenaikan pada harga BBM bersubsidi supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan konsumsi menjadi meningkat yang membuat pengeluaran untuk konsumsi tidak semakin bertambah.

Kata kunci: Perubahan Harga BBM Subsidi, Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

ABSTRACT

The needs for fuel is increasing every year. It is known that pertalite type fuel is almost 80% consumed by the public compared to other types of gasoline. As the capital of East Java and the second largest city in Indonesia, Surabaya has a larger population and number of motorized vehicle users compared to other regions in East Java. An increase in fuel prices can have an effect on the economy, one of which is inflation. High inflation causes people's purchasing power to decrease so that public consumption also decreases.

This research uses quantitative research. The type of data used is secondary data of the time series type sourced from BPS, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and Pertamina. The data collection technique is a literature study and the analysis technique used is multiple linear regression analysis.

Simultaneously, changes in the price of subsidized fuel oil (BBM) and inflation have a significant effect on household consumption expenditure in Surabaya. The coefficient of determination or R square is 0.860 which means that the effect of changes in subsidized fuel prices and inflation on household consumption expenditure in Surabaya is 86 percent. Partially, the price of subsidized fuel has a significant effect on household consumption expenditure. The inflation variable partially has an insignificant effect on household consumption expenditure. High inflation does not necessarily reduce the level of public consumption, because people still consume goods that are still needed. This is in accordance with the theory of inelasticity of demand which states that if there is a price change in a product, the demand for that product will not have a significant impact.

Changes in subsidized fuel prices have disrupted the national and regional economies such as Surabaya. The advice from researchers for the Surabaya City Government is to maintain the stability of the inflation rate due to an increase in subsidized fuel prices so that people's purchasing power is maintained and consumption increases which makes spending on consumption not increase.

Keyword: Changes in Subsidized Fuel Prices, Inflation, Household Consumption Expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>DECLARATION</i>.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	35
2.3 Kerangka Konseptual.....	39
2.4 Pengaruh Perubahan Harga BBM Subsidi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	41
2.5 Pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	42
2.6 Hipotesis	44

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.7 Pengujian Hipotesis	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Kota Surabaya	51
4.2 Perubahan Harga BBM Subsidi	55
4.3 Inflasi	58
4.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	65
4.7 Pembahasan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.3 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Minyak di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Harga BBM Subsidi Jenis Pertalite Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 1.3	Konsumsi Pangan dan Non Pangan Surabaya Tahun 2018-2022.....	9
Tabel 1.4	PDRB Surabaya Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2022.....	10
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan di Kota Surabaya.....	52
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 4.5	Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.7	Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi.....	65
Tabel 4.9	Uji f (simultan) Harga BBM Subsidi (X1) dan Inflasi (X2) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y).....	66
Tabel 4.10	Uji t (parsial) Variabel Harga BBM Subsidi (X1) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y).....	67
Tabel 4.11	Uji t (parsial) Variabel Inflasi (X1) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y)	67
Tabel 4.12	Koefisien determinasi	68
Tabel 4.13	Analisis regresi linier berganda	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Volume Impor Minyak Indonesia (Ribu Ton) Tahun 2011-2021.....	3
Gambar 1.2	Inflasi di Indonesia.....	5
Gambar 1.3	Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Tahun 2019-2022.....	6
Gambar 2.1	Kurva Keseimbangan Harga.....	14
Gambar 2.2	Kurva Konsumsi	33
Gambar 4.1	Perubahan Harga BBM 2001-2022.....	56
Gambar 4.2	Inflasi Umum Kota Surabaya 2001-2022	58
Gambar 4.3	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota Surabaya 2001-2022.....	60

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Data Perubahan Harga BBM Subsidi, Inflasi, dan Konsumsi Rumah Tangga	86
Lampiran 6.2 Biodata Peneliti	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk yang menempati semakin bertambah dan juga diikuti dengan jumlah kendaraan pribadi yang meningkat pula. Hal ini dikarenakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi, berupa mobil dan motor. Dalam menjalankan kendaraan tersebut tentunya membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut akhirnya menimbulkan besarnya kebutuhan akan BBM.

Pada mulanya, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Besarnya ekspor minyak yang dilakukan Indonesia membuat negara ini tergabung dalam organisasi negara pengekspor minyak yaitu *Organization of The Petroleum Exporting Countries* atau OPEC. Namun pada tahun 2008, Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC melihat konsumsi akan minyak semakin meningkat tiap tahunnya dan juga produksi yang semakin lama mengalami tren penurunan (Kementerian ESDM, 2008).

Didapatkan bahwa produksi minyak di Indonesia terus mengalami tren penurunan. Sehingga ekspor minyak yang dapat dilakukan oleh Indonesia juga terbatas. Dari Tabel 1.1 didapatkan bahwa kebutuhan dan permintaan akan minyak tiap tahunnya semakin bertambah. Menurut Rahmawati *et al.* (2018) suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila mampu memperkirakan permintaan

yang nantinya untuk mengetahui jumlah produksi yang dihasilkan, berapa biaya produksi yang dihabiskan, dan memperkirakan keuntungan yang didapatkan.

Tabel 1.1 Perkembangan Minyak di Indonesia

Tahun	Harga ICP (US\$ Per Barel)	Produksi (Ribu Barel Per Hari)	Konsumsi (Ribu Barel Per Hari)
2002	18,89	1.249,03	1.125,65
2003	35,03	1.155,37	1.142,67
2004	32,1	1.095,64	1.232,57
2005	35,86	1.066,75	1.270
2006	53,95	1.019,22	1.218,60

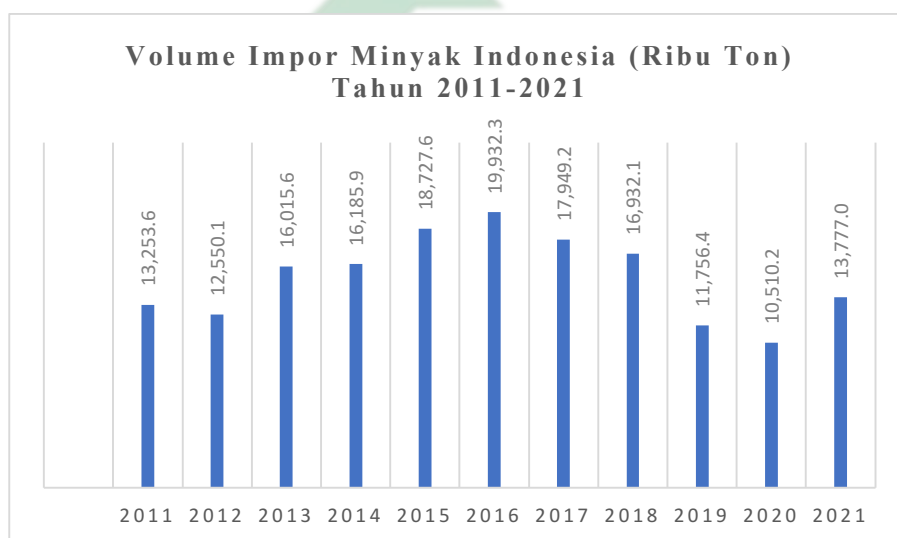
Sumber: BPS

Dari hal tersebut didapatkan bahwa permintaan semakin bertambah namun tidak dapat diikuti dengan produksi yang meningkat pula, sehingga hal tersebut akan berdampak pada harga yang akan dipasarkan. Pada saat ini Indonesia menjadi negara dengan impor minyak lebih besar dibandingkan dengan eksportnya. Sejak tahun 2003, Indonesia telah menjadi negara *net importir* minyak (Kementerian ESDM, 2008).

Acuan dalam biaya perolehan BBM yaitu berasal dari indeks pasar BBM yang dipengaruhi oleh harga *Indonesian Crude Price* (ICP). Harga rata-rata ICP pada tahun Maret 2022 mencapai US\$113,50 per barel yang semula hanya sebesar US\$95,72 per barel pada bulan sebelumnya (Kementerian ESDM, 2022a). Meningkatnya harga ICP, membuat pemerintah perlu melakukan tindakan untuk dapat menekan harga BBM khususnya BBM subsidi supaya tetap mampu menjangkau kalangan menengah bawah.

Berdasarkan data dari BPS sesuai dalam Gambar 1.1, impor minyak Indonesia pada tahun 2021 mencapai 13,8 juta ton, hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,5 juta ton. Dapat

dilihat bahwa minyak menjadi kebutuhan yang penting ditambah dengan konsumsi BBM yang semakin meningkat. Harga BBM di Indonesia mengikuti perkembangan harga pasar minyak dunia. Sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan subsidi supaya harga BBM dapat dijangkau ke golongan masyarakat menengah bawah.



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 1.1

Volume Impor Minyak Indonesia (Ribuan Ton) Tahun 2011-2021

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis BBM subsidi yaitu pertalite dan solar. Pertalite menjadi jenis BBM subsidi yang paling sering dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM jenis pertalite ini semakin meningkat tiap tahunnya. Guna kuota subsidi BBM tepat sasaran, jenis kendaraan tertentu diharuskan untuk mengunduh aplikasi MyPertamina yang diselenggarakan oleh PT. Pertamina, hal ini dilakukan

supaya BBM subsidi dapat tersalurkan kepada golongan masyarakat menengah bawah yang lebih membutuhkannya.

Pada tahun 2021, konsumsi pertalite mencapai 23 kiloliter (KL) atau hampir 80% dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan dengan jenis bensin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium (Kementerian ESDM, 2022b). Secara persentase kenaikan harga BBM jenis pertalite pada tahun 2022 mencapai 30 persen, hal tersebut tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Harga BBM Subsidi Jenis Pertalite Tahun 2018-2022

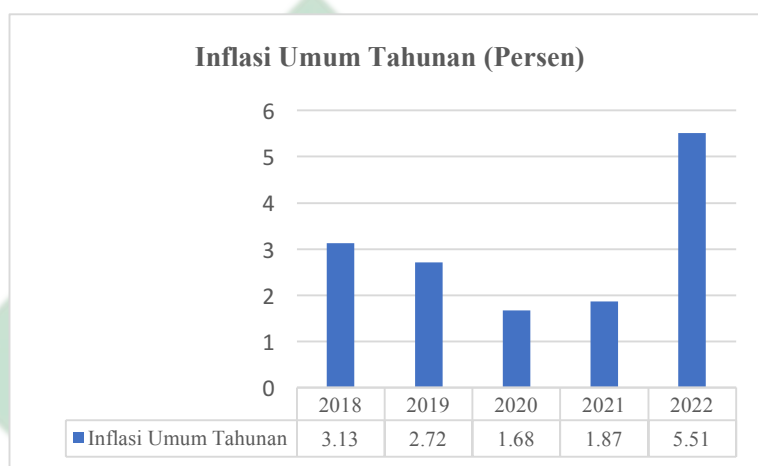
Tahun	BBM Pertalite (Rupiah)
2018	7.800
2019	7.650
2020	7.650
2021	7.650
2022	10.000

Sumber: Pertamina, data diolah

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tentunya akan semakin memberatkan anggaran negara. Semakin meningkatnya harga minyak dunia, maka anggaran negara untuk subsidi minyak semakin meningkat pula. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 perihal kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat.

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) “*Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi tiga kali lipat. Dalam hal ini, kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun, serta untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Kemudian, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun*”.

Kenaikan pada harga BBM dapat memberikan efek terhadap perekonomian, salah satunya yaitu inflasi. Inflasi tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin menurun. Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap perekonomian dikarenakan konsumsi masyarakat menjadi salah satu komponen penting yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu negara.



Sumber: BPS, data diolah

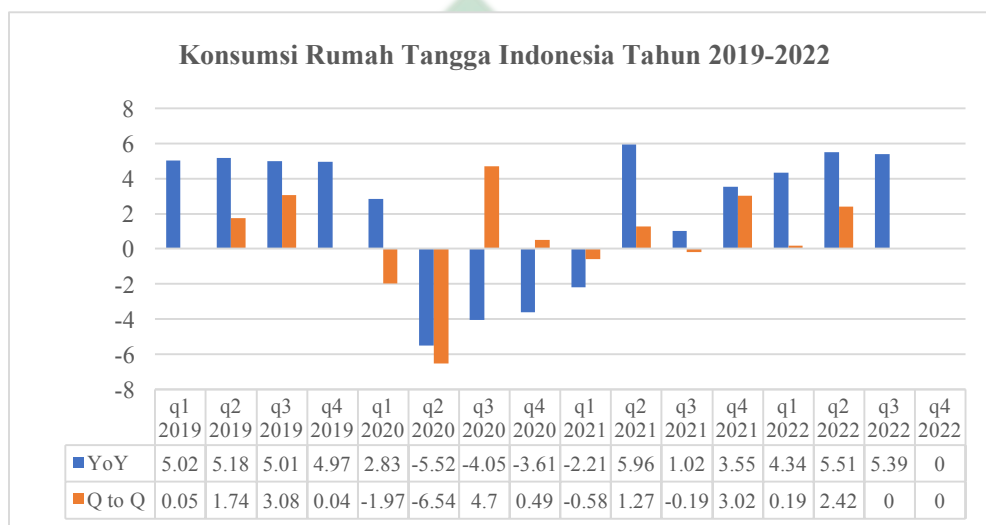
Gambar 1.2

Inflasi di Indonesia

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2022 menjadi tahun dengan inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Inflasi *year on year* (y-o-y) Indonesia mencapai 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Hal ini disebabkan oleh naiknya pada beberapa pengeluaran salah satunya yang tertinggi pada kelompok transportasi yaitu sebesar 15,26 persen. Selain itu juga disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM pada September 2022 (BPS, 2023).

Sejumlah 230 juta penduduk, Indonesia adalah negara di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga memainkan peran yang signifikan dan tidak terpisahkan

dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Populasi yang besar di suatu negara mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah ukuran kesejahteraan rumah tangga yang ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Wiranthi, 2014).



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 1.3

Konsumsi Rumah Tangga Indonesia Tahun 2019-2022

Di konsumsi rumah tangga, pada kuartal II 2020 konsumsi rumah tangga menunjukkan di bawah angka 0 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2022 tumbuh sebesar 5,39% lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal tersebut masih terbilang cukup baik karena didorong oleh adanya aktivitas belanja kebutuhan tersier yang meningkat pada kelompok menengah atas. Sedangkan pada kelompok masyarakat bawah, daya belinya terbantu oleh adanya bantuan sosial dan subsidi energi (Kusnandar, 2022).

Kondisi ini semakin memulih dan berangsur meningkat setelah meredanya pandemi *Covid-19* yang melanda hampir di seluruh bagian provinsi di Indonesia tidak terkecuali Jawa Timur yang membuat konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan. Jawa Timur juga memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Selain itu Jawa Timur dikenal sebagai provinsi dengan tingkat signifikansi perekonomian yang cukup tinggi dan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 14,85 persen. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang yang menstabilkan perekonomian Jawa Timur. Selama periode tahun 2017-2021, rata-rata komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memberikan kontribusi sangat besar yaitu 59,67 persen (Kominfo, 2022).

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar nomor 2 di Indonesia, tentunya Surabaya memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Surabaya mencapai 3.157.126 jiwa (Pemkot Surabaya, 2021). Hal tersebut membuat pengguna kendaraan bermotor di Surabaya paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Berdasarkan BPS (2021), pada tahun 2020 pengguna mobil pribadi di Surabaya mencapai 503.066 unit dan pengguna sepeda motor sebanyak 2.599.332 unit.

Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Surabaya membuat konsumsi BBM di Surabaya meningkat tiap tahunnya. BBM menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Surabaya, sehingga ketika terjadi pengumuman kenaikan harga BBM pada September 2022 membuat Surabaya mengalami

inflasi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Jawa Timur. Selain itu biaya hidup di Surabaya cenderung tinggi, sehingga pengeluaran per kapita rumah tangga di Surabaya tidak memungkinkan adanya golongan rumah tangga yang sebulan hanya menghabiskan sebanyak Rp199.999.

Berdasarkan BPS (2022) 8 kota IHK di Jawa Timur mengalami inflasi selama bulan September 2022. Tingkat inflasi tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya yakni sebesar 1,52 persen. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain: bensin, solar, beras, dan angkutan antar kota. (Kilasjatim, 2022) *“Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiawan, mengatakan awal September pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Kenaikan harga BBM ini yang akhirnya memicu inflasi”*.

Di Surabaya, harga bahan pokok masih terbilang stabil setelah naiknya harga BBM. (Syaifuddin, 2022) *“Menurut pendapat pedagang, kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, seperti inflasi, biaya transportasi, hingga lonjakan harga pangan”*. Para pedagang masih berusaha untuk tetap mempertahankan harga sembako supaya daya beli masyarakat tetap stabil.

Dalam menentukan pengeluaran konsumsi pada suatu daerah, digunakan indikator berupa pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga yang dihabiskan untuk konsumsi barang dan jasa dibagi banyaknya anggota rumahnya yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli.

Selama lima tahun terakhir berdasarkan Tabel 1.3, konsumsi pangan dan non pangan di Surabaya memperlihatkan tren kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, konsumsi per kapita rumah tangga dalam sebulan di Surabaya mengalami penguatan dan menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan mencapai Rp1,95 juta yang awalnya hanya sebesar Rp1,80 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia khususnya Surabaya mulai bangkit dan masyarakat mulai melakukan konsumsi kembali.

Tabel 1.3 Konsumsi Pangan dan Non Pangan Surabaya Tahun 2018-2022

Tahun	Konsumsi		Rata-rata Pengeluaran Per Kapita
	Pangan	Non Pangan	
2018	776.985	1.120.876	1.897.861
2019	742.013	1.285.567	2.027.580
2020	777.725	1.101.421	1.879.146
2021	810.743	1.141.846	1.952.589
2022	819.124	1.149.824	1.952.590

Sumber: BPS Kota Surabaya, data diolah

Pada tahun 2022, konsumsi pangan dan konsumsi non pangan memperlihatkan peningkatan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp1,95 juta. Rata-rata pengeluaran konsumsi pangan masyarakat Surabaya yang awalnya sebesar Rp810.743 menjadi Rp819.124 pada tahun 2022. Sama halnya dengan konsumsi non pangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang awalnya sebesar Rp1,14 juta menjadi Rp1,15 juta.

Dari hal tersebut didapatkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat Surabaya mulai mengalami perkembangan. Pengeluaran masyarakat tidak lagi hanya untuk konsumsi pangan, namun bergeser ke konsumsi non pangan.

Pergeseran pola konsumsi ini disebabkan oleh perubahan pendapatan seseorang. Kondisi ini terlihat dari masyarakat yang mulai jenuh dengan pendapatan yang digunakan untuk mengonsumsi makanan, sehingga masyarakat mulai menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi non pangan.

Tabel 1.4 PDRB Surabaya Menurut Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2020-2022

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	-2,83	0,91	4,90

Sumber: BPS Kota Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya menurut pengeluaran memberikan kontribusi sebesar 4,90 persen (BPS Kota Surabaya, 2023). Hal ini didukung dengan ketahanan pangan masyarakat Surabaya yang menguat setelah mengalami pandemi *Covid-19* yang melanda 2 tahun terakhir.

Dalam perekonomian tentunya terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi sehingga mampu memberikan dampak pada perekonomian nasional hingga perekonomian regional dan juga mampu berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Dari pemaparan latar belakang di atas yakni peneliti ingin tahu apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara perubahan BBM subsidi dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi

tentang **“Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, berikut merupakan rumusan masalah yang dapat diambil:

- 1.2.1 Apakah perubahan harga BBM subsidi dan inflasi memberikan pengaruh secara simultan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya?
- 1.2.2 Apakah perubahan harga BBM subsidi dan inflasi memberikan pengaruh secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut merupakan tujuan penelitian:

- 1.3.1 Mengetahui pengaruh secara simultan perubahan harga BBM subsidi dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.
- 1.3.2 Mengetahui pengaruh secara parsial perubahan harga BBM subsidi dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian dari aspek teoritis dan juga aspek praktis sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan teori untuk digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, penambahan ilmu pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang telah didapat selama masa perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat luas dan dijadikan sebagai bahan dalam menambah ilmu pengetahuan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Harga

2.1.1.1 Konsep Harga

Dalam melakukan suatu kegiatan jual-beli, harga dijadikan sebagai alat tukar dalam bertransaksi untuk dapat menentukan keputusan konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa. Harga bersifat fleksibel yang dimana suatu waktu nilainya dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Dalam menentukan harga, produsen harus dapat mengetahui kondisi pasar terkini sehingga harga dapat ditentukan dan ditetapkan.

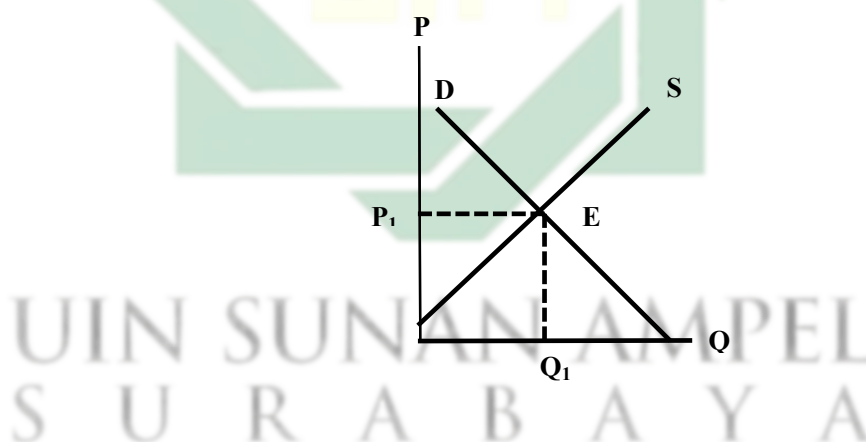
Menurut Philip & Armstrong (2014) harga adalah sejumlah uang yang dibelanjakan konsumen untuk barang atau jasa sebagai imbalan atas keuntungan menggunakan barang atau jasa tersebut. Setyo (2017) menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membeli nilai barang atau jasa yang sesuai dengan keunggulan dan kualitas yang ditawarkan oleh komoditas tersebut, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan faktor-faktor lain yang berdampak pada harga itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan pengertian dari harga di atas, kesimpulannya yaitu harga merupakan suatu nilai dari sejumlah uang untuk produk atau jasa yang telah ditentukan oleh produsen

untuk ditukarkan nilainya oleh konsumen menjadi suatu produk dan juga untuk menjalankan kegiatan perekonomian secara terus menerus.

2.1.1.1 Teori Harga

Teori harga merupakan teori yang menunjukkan terbentuknya harga pada suatu barang di pasar. Harga suatu barang ditentukan dari besarnya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar (Damanik & Sasongko, 2010). Sedangkan permintaan dan penawaran sendiri dapat ditentukan oleh banyaknya faktor yang terjadi. Permintaan dan penawaran suatu harga dapat dilihat dari kurva, sebagai berikut:



Sumber: Damanik & Sasongko, 2010

Gambar 2.1

Kurva Keseimbangan Harga

Garis D merupakan garis *demand* atau permintaan. Garis permintaan merupakan jumlah permintaan dari suatu barang pada tingkat harga tertentu. Garis s merupakan garis *supply* atau

penawaran. Garis penawaran ialah jumlah penawaran dari suatu barang pada tingkat harga tertentu. Titik E menunjukkan titik pertemuan antara garis permintaan dengan garis penawaran. Titik E itulah yang menunjukkan titik keseimbangan harga pasar.

Kemampuan konsumen untuk dapat membayar suatu barang data ditunjukkan dari fungsi *demand*. Fungsi *demand* atau permintaan pada suatu barang dapat menunjukkan tingkat elastisitas harga berdasarkan respon dari konsumen terhadap perubahan harga. Pada perusahaan informasi mengenai elastisitas produk sangat dibutuhkan untuk dapat menentukan harga pada produk tersebut. Elastisitas menjadi suatu pola reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga.

2.1.1.2 Indikator Harga

Harga menjadi penentu dari permintaan suatu pasar. Menurut Tjiptono (2002) terdapat beberapa indikator harga, sebagai berikut:

1. Harga yang terjangkau. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penetapan harga perusahaan sejalan dengan daya beli konsumen.
2. Harga sesuai dengan kualitas produk. Hal ini adalah penetapan harga yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kualitas barang yang akan dipasarkan.

3. Harga yang bersaing. Hal ini mengindikasikan bahwa penawaran perusahaan berbeda dari para pesaingnya untuk jenis produk yang sama.
4. Harga yang diberikan sesuai dengan manfaat. Ini adalah harga yang digunakan perusahaan sesuai dengan manfaat yang akan diterima oleh pelanggan yang menggunakan produk.

2.1.1.3 Intervensi Pasar

Terdapat beberapa komoditi yang berdasarkan pada kebijakan dari pemerintah. Tetapi, kebijakan pemerintah bukan termasuk dalam kekuatan pada permintaan dan penawaran, namun menjadi salah satu faktor yang terjadi pada permintaan dan penawaran dalam penentuan harga dan jumlah dari suatu barang.

Terdapat beberapa intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, sebagai berikut:

1. Penetapan harga minimum (*price floor*). Penetapan harga ini digunakan untuk melindungi para produsen yang dimana harga minimum ini harus lebih tinggi dari pada harga pasar. Dalam pelaksanaan intervensi ini, pemerintah harus mampu mengikuti permintaan dan penawaran di pasar. Tetapi, terdapat kelemahan pada intervensi ini yaitu dapat mengakibatkan inefisiensi produksi karena harga minimum cenderung tinggi, sehingga hal tersebut membuat produsen mengalami produksi yang berlebih.

Selain itu, dapat mengakibatkan inefisiensi konsumsi yang membuat konsumsi mengalami penurunan yang mampu mengurangi surplus konsumen.

2. Penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*). Penetapan harga ini merupakan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi konsumen.
3. Penetapan harga pada komoditi tertentu (*price fixing*). Produsen yang ingin menetapkan harga pada suatu komoditi harus memiliki *market power*. Penetapan harga *price fixing* ini merupakan perjanjian terlarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaing dalam menentukan harga pada suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.

Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu dimana terjadi bencana, krisis minyak, dan pangan internasional membuat pemerintah harus mampu mengambil kebijakan untuk dapat mengendalikan harga. Pasar tidak lagi mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*). Hal ini disertai dengan terbatasnya stok barang-barang yang mengharuskan adanya penjatahan pada konsumen.

2.1.1.4 Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas) pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “*Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi*”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi) merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang dicampurkan dan diolah dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, kualitas, harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi”.

Harga BBM dapat berfluktuasi mengikut perkembangan harga pasar minyak dunia. BBM menjadi salah satu komoditas yang diperlukan oleh seluruh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang. Penetapan harga BBM jenis subsidi dilakukan oleh pemerintah setiap 3 bulan. Dalam penetapan tersebut pemerintah perlu memerhatikan berbagai aspek, diantaranya yaitu kondisi keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta daya beli masyarakat (Kementerian ESDM, 2018).

Harga dasar BBM terdiri dari beberapa komponen, yaitu penyimpanan dan distribusi serta margin. Biaya yang terkait dengan penyediaan bensin dikenal sebagai biaya perolehan, sedangkan biaya yang terkait dengan pendistribusian bahan bakar di seluruh Indonesia dikenal sebagai biaya penyimpanan dan distribusi. (Kementerian ESDM, 2018).

Kenaikan harga BBM merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dikarenakan naiknya harga minyak dunia dan juga APBN mengalami defisit (Hermawan, 2006). Kenaikan harga BBM tentunya memberi pengaruh terhadap makro ekonomi.

Naiknya harga BBM berpengaruh secara meluas terhadap beberapa indikator makro ekonomi, sehingga hal ini akan berimbas ke berbagai lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah bawah sampai dengan masyarakat miskin dan setengah miskin. Hal ini memberikan efek pada daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan, khususnya dirasakan oleh masyarakat dengan kemampuan untuk membeli rendah dan miskin baik diperkotaan maupun wilayah pedesaan (Muhardi, 2005).

Berdasarkan Tambunan (2003) menyatakan bahwa meningkatnya harga BBM memberikan dampak negatif, antara lain:

1. Ketergantungan pada sumber energi minyak bumi semakin meningkat dibuktikan dengan minyak bumi yang mendominasi sumber energi domestik.
2. Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) mengalami ancaman fiskal dikarenakan pemberian subsidi BBM.
3. Sumber energi lain tidak dimanfaatkan secara optimal melihat ketersediaannya yang cenderung lebih banyak dibandingkan minyak bumi seperti batu bara, fosil, dan sebagainya.
4. Terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri yang mengakibatkan tingginya permintaan dari pada kebutuhan pada sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.
5. Terjadinya kegiatan BBM oplosan yang merugikan negara dan konsumen.

6. Harga mendistorsi kelayakan investasi di hilir minyak.

Kebutuhan akan BBM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan melihat dari jumlah masyarakat yang membutuhkan dan juga mengkonsumsi BBM juga meningkat. Menilik dari kondisi masyarakat saat ini, dimana rata-rata berdaya beli menengah bawah membuat realisasi akan penghematan penggunaan BBM sulit untuk dilaksanakan secara optimal. BBM menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat meringankan beban masyarakat terhadap adanya kenaikan harga BBM, pemerintah melakukan pemberian subsidi kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir (Muhardi, 2005).

2.1.2 Subsidi

2.1.2.1 Pengertian Subsidi

Subsidi ialah suatu alat pemerataan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara untuk dapat membantu masyarakat dengan perekonomian ke bawah (Soen *et al.*, 2022). Subsidi diberikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kestabilan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya yaitu subsidi BBM. Hal ini dilakukan supaya masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah agar kegiatan yang memerlukan BBM biayanya menjadi lebih murah.

Berdasarkan RAPBN dan Nota Keuangan pada setiap tahun, subsidi BBM ialah "*Pembayaran yang dilakukan*

oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia, sejak tahun 2009 sudah tidak dimonopoli lagi) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”.

2.1.2.2 Bentuk Subsidi

Bentuk subsidi dibagi menjadi dua menurut Wardana (2020), yaitu:

a. Profit Loss

Subsidi ialah biaya yang dikeluarkan untuk menutupi adanya beda antara harga jual dengan harga pokok. Jadi subsidi ini menjadi bentuk persamaan antara harga jual dengan harga pokok untuk menutupi adanya selisih dari untung atau rugi bagi produsen.

b. Cost Loss

Harga jual menggunakan harga pasar tidak berdasarkan harga pokok dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung.

2.1.2.3 Dampak Subsidi

Terdapat dua dampak yang dapat diberikan karena adanya subsidi (Ibnu, 2021), yaitu:

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif yang diperoleh ialah:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi dimana tetap akan menjaga daya beli masyarakat.
2. Ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan lebih rendah atau kurang mampu, produk ini akan sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya.
3. Sisi pelaku usaha, subsidi dapat mencegah kebangkrutan dikarenakan subsidi tetap harus memperhatikan keseimbangan pasar dan meningkatkan kualitas ekonominya.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatifnya yaitu:

1. Kecenderungan masyarakat untuk menghabiskan pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan menabung.
2. Dapat menyebabkan penyimpangan harga dikarenakan subsidi kurang memperhatikan aspek efisiensi dan target subsidi tidak tepat sasaran.
3. Mekanisme pasar terganggu dikarenakan subsidi membutuhkan biaya ekonomi yang besar dan dapat menyebabkan kerugian di pihak swasta.

2.1.2.4 Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi bahan bakar menjadi suatu tujuan bagi pemerintah untuk

mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat inflasi tiap tahunnya. Dengan diberikannya subsidi ini membuat industri mampu menghemat biaya produksi sehingga harga jual dari produk dapat lebih murah dan masyarakat dapat mengonsumsi dengan biaya lebih terjangkau.

Tarigan (2014) menyatakan bahwa tujuan dari pemberian subsidi yaitu sebagai alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meminimalisir ketimpangan keterjangkauan pada barang dan jasa. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga agar harga tetap terjangkau oleh sebagian besar kelompok masyarakat, subsidi juga diberikan untuk mengurangi beban masyarakat. Dalam kasus subsidi bensin, subsidi tersebut berbentuk alokasi anggaran negara yang didistribusikan oleh BUMN atau sektor swasta.

Menurut Nugroho (2005) definisi dari Sebagai distributor eksklusif bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, Pemerintah Indonesia akan memberikan kompensasi kepada PT Pertamina ketika pendapatannya dari penjualan BBM di pasar domestik kurang dari harga produksi dan distribusi BBM.

Berdasarkan pernyataan Listiyanto (2008), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi subsidi BBM, sebagai berikut:

1. Harga pasar minyak mentah dunia.
2. Kemampuan kilang-kilang minyak dalam mengolah minyak menjadi BBM.
3. Pelaksanaan *import* produk BBM.
4. Kurs rupiah terhadap US\$.
5. Besarnya volume konsumsi dalam negeri.

2.1.3 Inflasi

2.1.3.1 Definisi Inflasi

Menurut definisi dari BPS (2022) inflasi yaitu cenderungnya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi ialah salah satu indikator dari makro ekonomi yang dapat memengaruhi nilai uang dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Utari *et al.*, 2015).

2.1.3.2 Pengukuran Inflasi

Dalam mengukur perubahan inflasi yang terjadi dari waktu ke waktu, biasanya diukur dalam suatu angka indeks (Utari *et al.*, 2015). Angka indeks yang digunakan untuk menghitung besaran inflasi, yaitu:

- a. Indeks Harga Produsen (IHP)

Pengukuran yang dilakukan dikarenakan adanya perubahan harga untuk barang yang diproduksi oleh produsen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Pengukuran yang dilakukan karena adanya perubahan harga yang terjadi antara penjual pertama dengan pembeli berikutnya dalam jumlah yang besar pada pasar pertama.

c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Didapatkan dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat bergantung pada pola konsumsi masyarakatnya.

2.1.3.3 Penyebab Inflasi

Terdapat beberapa kondisi yang mampu mengakibatkan tinggi inflasi (Astuti, 2021), antara lain:

a. Inflasi Kenaikan Biaya Produksi (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh adanya kelangkaan dalam produksi maupun distribusi walaupun permintaan di pasar tidak mengalami perubahan secara signifikan.

Meningkatnya biaya produksi disebabkan oleh salah satunya yaitu kenaikan harga bahan baku. Selain itu dapat disebabkan oleh kenaikan gaji/upah pegawai.

b. Inflasi Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi dapat disebabkan oleh adanya permintaan masyarakat yang meningkat terhadap suatu barang. Keinginan tersebut membuat permintaan menjadi meningkat sedangkan penawaran tetap, hal tersebut yang membuat harga menjadi naik.

c. Tingginya Peredaran Uang

Salah satu penyebab inflasi yaitu peredaran uang yang tidak terkontrol di masyarakat. Ketika jumlah barang tetap namun uang beredar meningkat dua kali lipat, maka hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya harga-harga yang dapat mencapai 100 persen. Hal ini dapat terjadi ketika pemerintah mengalami anggaran defisit yang membuat pemerintah diharuskan mencetak uang baru untuk mengatasinya.

2.1.3.4 Dampak Inflasi

Inflasi memberikan dampak secara keseluruhan kepada masyarakat dikarenakan dapat memengaruhi daya beli dan juga produsen (Utari *et al.*, 2015). Dampak dari adanya inflasi tinggi dan tidak stabil yaitu:

a. Penurunan Daya Beli

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya daya beli dikarenakan nilai mata uang yang semakin rendah.

b. Kondisi Ketidakpastian

Inflasi tinggi dan tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian untuk masyarakat dikarenakan tidak mampu menentukan alokasi dananya.

c. Berkurangnya Daya Saing Produk Nasional

Inflasi tinggi dapat menyebabkan tingginya biaya produksi sehingga barang produksi nasional sulit untuk dijual dan dikonsumsi dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.4 Konsumsi

2.1.4.1 Definisi Konsumsi

Dalam artian kajian ekonomi, konsumsi adalah aktivitas menggunakan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Mishkin (2008) konsumsi adalah pengeluaran yang dihabiskan oleh konsumen pada barang dan jasa yang tidak tahan lama. Haslina (2018) menyatakan bahwa konsumsi ialah aktivitas dalam memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan.

Dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan kegiatan yang dikeluarkan oleh setiap individu atau rumah tangga untuk menggunakan barang dan jasa yang tidak tahan lama guna memenuhi kehidupan sehari-hari.

2.1.4.2 Teori Konsumsi

a. Teori Konsumsi Ernst Engel

Menurut Ernst Engel (1821-1896) “*Saat pendapatan naik, maka proporsi pendapatan dipergunakan untuk membeli makanan akan menurun, bahkan apabila pada faktanya pengeluaran untuk makanan semakin tinggi*”. Hukum Engel ini menyatakan bahwa kesejahteraan akan semakin tinggi jika proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan cenderung menurun dibandingkan dengan pengeluaran non-pangan yang semakin meningkat.

b. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Jumlah konsumsi saat ini memiliki korelasi dengan level pendapatan. Hubungan ini dijelaskan melalui fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes memberikan dugaan tentang teori konsumsi, sebagai berikut:

1. Kecenderungan untuk konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) yaitu kenaikan konsumsi yang diakibatkan oleh naiknya pendapatan sebanyak satu-satuan berkisar antara nol dan satu. Dari perkiraan ini didapatkan bahwa tingginya pendapatan seseorang akan berbanding lurus pula dengan konsumsi dan tabungannya.
2. Kecenderungan untuk konsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) akan turun jika taraf pendapatan naik dan sebagian pendapatannya akan disisakan untuk menabung.

3. Pendapatan ialah determinasi konsumsi yang penting dan tingkat bunga dianggap tidak memiliki peran penting.

c. Teori Konsumsi Hipotesis Daur/Siklus Hidup (*Life-Cycle Hypothesis*)

Teori ini dipopulerkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando dan Richard Brumberg. Teori ini menyebut bahwa pengeluaran masyarakat didasari oleh pola pendapatan dan pola pengeluaran untuk konsumsi biasanya dipengaruhi oleh waktu dalam siklus hidupnya. Individu cenderung memiliki pendapatan yang rendah waktu usianya masih muda, tinggi pada usia menengah dan rendah pada usia renta. Hal itu akan memunculkan perkiraan bahwa saat usia muda tabungan negatif, pada usia menengah akan mulai menabung dan membayar pinjaman waktu usia muda, dan ketika usia renta akan mengambil tabungan yang telah dikumpulkan saat usia menengah.

d. Teori Konsumsi Model Pilihan Antar Waktu Irving Fisher (*Fishers Intertemporal Choice*)

Teori Irving Fisher ini menyatakan bahwa “*Individu akan menetapkan pembagian pendapatan untuk digunakan konsumsi dan sebagian ditabung, serta mempertimbangan kondisi pada saat ini dan masa yang akan datang*”.

e. Hipotesis Pendapatan Tetap (*Permanent Income Hypothesis*)

Teori ini dipopulerkan oleh Milton Friedman. Berdasarkan teori ini, manusia dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan pendapatannya, yaitu pendapatan tetap dan pendapatan transitoris. Pendapatan tetap ialah pendapatan yang diharapkan pada masa yang akan datang mampu untuk bertahan. Sedangkan pendapatan transitoris yaitu bagian pendapatan yang tidak dapat terus bertahan. Menurut Friedman konsumsi seharusnya lebih bergantung pada pendapatan tetap, hal tersebut dikarenakan konsumen memakai tabungan dan pinjaman untuk dikonsumsi ketika pendapatan transitoris mengalami perubahan.

2.1.4.3 Jenis Pengeluaran Konsumsi

Dalam menentukan jenis konsumsi, masyarakat cenderung melihat pada pendapatan yang diperoleh. Suatu keluarga akan memilih jenis konsumsi sesuai dengan kemampuan yang dapat dikeluarkan. Konsumsi terdiri dari dua kelompok, yaitu konsumsi yang dikeluarkan untuk pangan dan non pangan. Penjelasan sebagai berikut:

a. Konsumsi Pangan

Menurut BKP (2014) *“Konsumsi pangan ialah total makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat terpenuhi kebutuhan gizinya”*. Konsumsi pangan merupakan kebutuhan setiap

keluarga untuk dapat memenuhi konsumsi seperti beras, jagung, terigu, ubi kayu, ubi jalar, sagu dan umbi lainnya (Ariani, 2007).

Konsumsi pangan termasuk kebutuhan yang harus seimbang dan tidak bisa jika hanya bertumpu pada salah satu jenis makanan saja, apabila hanya memenuhi kebutuhan salah satu jenis makanan saja, maka akan menimbulkan penyakit seperti obesitas, kolesterol, dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila kebutuhan gizi seseorang tidak dapat terpenuhi secara baik, maka juga akan menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak-anak maupun remaja (Ermawati & Sarana, 2018).

b. Konsumsi Non Pangan

Konsumsi non pangan ialah pengeluaran konsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; dan bahan tahan lama (Mulyani, 2015).

Konsumsi dilakukan untuk mempertahankan tingkat hidup tiap individu. Pada tingkat pendapatan rendah, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsumsi makanan menjadi suatu hal yang penting karena merupakan barang utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola konsumsi makanan dapat berubah sesuai dengan kondisi rumah tangga. Pada saat ini pola konsumsi

masyarakat bergeser ke konsumsi makanan jadi seperti restoran, warung, dan lainnya sehingga menyebabkan penurunan pada konsumsi beras pada masyarakat.

Tetapi tentunya seseorang juga masih memerlukan kebutuhan lain disamping kebutuhan konsumsi makanan seperti konsumsi untuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya guna menyelenggarakan rumah tangga (Nurhasibah, 2021).

2.1.4.4 Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan individu atau kelompok yang tinggal secara bersama dalam suatu bangunan atau tempat tinggal. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ialah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membelanjakan pendapatannya pada barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dumairy, 2004). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga, yaitu *dipossible income* dan tingkat konsumsi pada periode sebelumnya (Komalawati *et al.*, 2021).

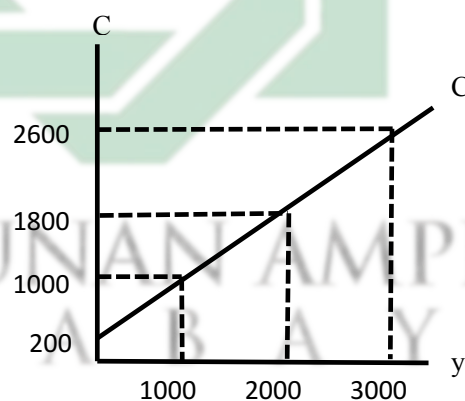
Berdasarkan teori Keynes yaitu konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan disposabel, sehingga terdapat batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya yaitu, terdapat tingkat konsumsi yang harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan adalah nol.

Konsumsi rumah tangga termasuk dalam perhitungan makro ekonomi dikarenakan beberapa alasan (Sudirman & Alhudori, 2018), yaitu:

1. Konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan yang besar dalam perekonomian suatu negara.
2. Besarnya pengeluaran untuk konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh.

2.1.4.5 Fungsi Konsumsi

Suatu kurva yang memperlihatkan tentang korelasi antara tingkat konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional (pendapatan disposibel) dalam suatu perekonomian disebut dengan fungsi konsumsi (Abidin, 2020).



Sumber: Mankiw, 2007

Gambar 2.2

Kurva Konsumsi

Konsumsi memiliki hubungan secara linier terhadap pendapatan, yang berarti kenaikan pendapatan rumah tangga akan

mendorong tingkat konsumsi. Blanchard & Johnson (2013) menjelaskan terdapat dua implikasi utama hubungan antara konsumsi dengan pendapatan, yaitu:

- a. Konsumsi merespons dalam proporsi yang lebih kecil terhadap fluktuasi pendapatan saat ini.

Apabila penurunan pendapatan bersifat permanen, maka konsumsi ikut menurun menyesuaikan dengan tingkat penurunan pendapatannya. Namun, apabila penurunan pendapatan bersifat sementara, maka masyarakat akan sedikit menyesuaikan konsumsinya sesuai dengan tingkat pendapatan saat ini.

- b. Konsumsi dapat berubah meskipun pendapatan saat ini tidak berubah.

Pada momen tertentu, ekspektasi masyarakat terhadap pendapatan yang diperoleh di masa mendatang akan meningkat, sehingga mereka akan meningkatkan konsumsinya meskipun pendapatan pada saat ini tetap.

Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$C = a + bY$$

Keterangan:

a = Konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0

b = Kecenderungan mengkonsumsi marginal

C = Tingkat Konsumsi

Y = Tingkat pendapatan nasional

Kecenderungan mengkonsumsi marjinal dinyatakan sebagai MPC (*Marginal Propensity to Consume*). MPC merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi (ΔC) dengan pertambahan disposable (ΔY_d). didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$$

Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC (*Average Propensity to Consume*) dimana APC merupakan perbandingan antara konsumsi (C) dengan pendapatan disposable (Y_d). Didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Berdasarkan jurnal (Tusri, 2017) yang berjudul “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan”. Dihasilkan berupa pengaruh variabel dampak kenaikan harga BBM (X) terhadap daya beli (Y) menggunakan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) menghasilkan sebesar 0,735 yang artinya yaitu terjadi hubungan yang signifikan antara dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau kurang mampu di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan.
2. Berdasarkan jurnal oleh (Iryanto & Moeis, 2021) yang berjudul “Dampak Perubahan Harga Energi terhadap Konsumsi Energi Rumah Tangga di Indonesia”. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan *Random*

Estimation Model (REM), yaitu bahwa harga BBM, harga listrik dan harga minyak dunia memberikan pengaruh secara negatif signifikan terhadap konsumsi BBM. Hal tersebut dikarenakan konsumsi energi untuk BBM dan listrik tidak terpengaruh dari faktor lain namun oleh harga energi itu sendiri dan pendapatan dari rumah tangga.

3. Dalam jurnal (Hrp & Aslami, 2022) yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”. Didapatkan hasil yaitu naiknya harga BBM akan berdampak pada masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat golongan bawah sampai masyarakat golongan atas. Akibat secara signifikan yang terjadi yaitu harga barang dan jasa mengalami kenaikan, laju pertumbuhan ekonomi melambat serta inflasi yang mungkin saja terjadi. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menanggapi harga BBM yang meningkat yaitu mengintervensi harga barang dan jasa secara umum supaya tidak mengalami peningkatan seiring dengan harga BBM yang naik serta pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penyesuaian harga BBM secara bertahap dan tingkat penyesuaian tersebut tidak terlalu besar.
4. (Maulina, 2022) dari jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja dan Inflasi terhadap Konsumsi Masyarakat”. Dihasilkan berupa tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2005 ditimbulkan dari adanya dampak kenaikan harga BBM dan terganggunya pasokan dan distribusi sehingga barang-barang mengalami peningkatan harga. Dengan perhitungan

menggunakan regresi linear berganda, didapatkan nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,017 yang berarti peningkatan inflasi sebesar 1 persen maka konsumsi masyarakat meningkat sebesar 0,017 persen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat.

5. Dari jurnal (Setiyowati, 2018) yang berjudul “Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat (Tinjauan Kritis Konsepsi Keadilan Sosial Ekonomi Ibnu Taimiyah)”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu pemerintah melakukan alokasi bantuan sosial berupa program-program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), termasuk beasiswa Bidik Misi. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah supaya daya beli masyarakat miskin tetap terjaga sebagai efek dari kebijakan dalam mengendalikan subsidi BBM. Peneliti menyimpulkan bahwa paket tunjangan untuk masyarakat miskin ini sesuai dengan konsep tunjangan yang setara Ibnu Taimiyah, sehingga mampu menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
6. Berdasarkan jurnal (Pigome *et al.*, 2019) yang berjudul “Pengaruh Harga Pertalite terhadap Daya Beli Konsumen pada SPBU Karang Tumaritis PT. Tri Tunggal Sakti Cemerlang di Kabupaten Nabire”. Jenis penelitian berupa kausalitas dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Dihasilkan berupa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti harga pertalite

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen. Perubahan harga pada pertalite akan mempengaruhi daya beli konsumen dalam membeli pertalite.

7. Dalam jurnal (Yuliani *et al.*, 2022) “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kecamatan Tambun Selatan dalam Masa Pandemi”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa dampak yang dirasakan tidak signifikan atau lebih ke arah positif. Kebijakan dalam menaikkan harga BBM saat pandemi memberikan dampak kepada masyarakat, didukung oleh kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu mengalami krisis yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa subsidi silang, namun dikarenakan tidak tepat sasaran menyebabkan masyarakat tidak merasakan hal tersebut.
8. Dalam skripsi (Alfiarinda, 2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan dan Inflasi Barang terhadap Konsumsi Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Didapatkan hasil yaitu variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga penerima BLT di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.
9. Menurut jurnal (Wiranthi, 2014) dengan Judul “Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Makro Rumah Tangga di Indonesia”. Teknik analisis

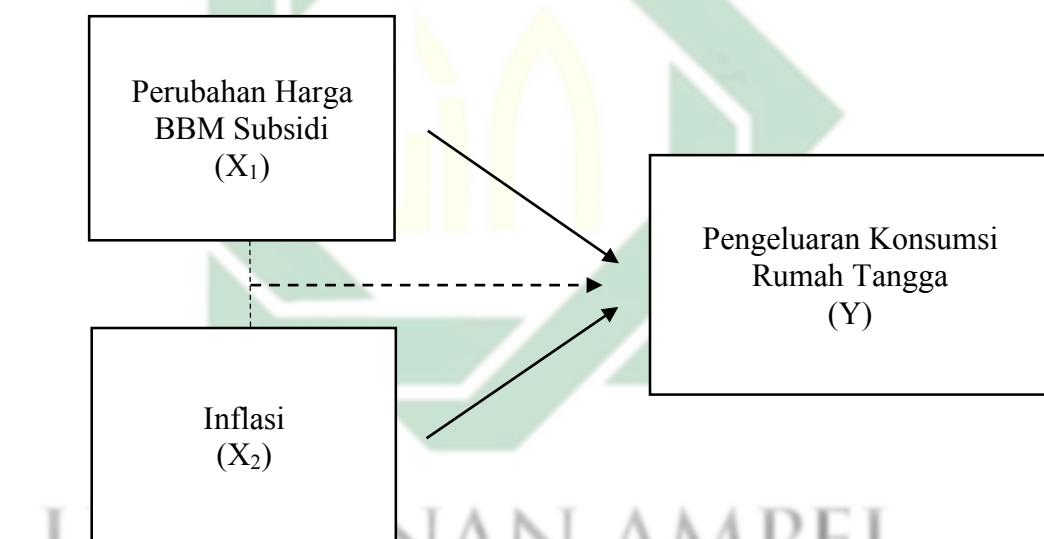
yang digunakan dalam jurnal ini yaitu analisis regresi berganda. Didapatkan hasil yaitu kenaikan harga BBM berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, apabila terjadi kenaikan harga BBM maka pengeluaran konsumsi rumah tangga secara makro mengalami penurunan sebesar -10.674,54 miliar, *ceteris paribus*.

10. Dari jurnal (Silalahi *et al.*, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar di Kota Medan”. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil yaitu perubahan harga BBM jenis premium memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat inflasi di Kota Medan secara parsial, sedangkan BBM jenis solar memberikan pengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Kota Medan. Harga premium dan harga solar yang mengalami perubahan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Kota Medan secara simultan.


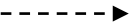
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah hubungan antar variabel yang dijabarkan melalui pemikiran-pemikiran yang logis. Konsumsi menjadi suatu keperluan utama dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai penentu tingkat perekonomian di suatu negara. Konsumsi tentunya memiliki hubungan dengan pendapatan seseorang, jika pendapatan naik akan meningkatkan konsumsi juga begitupula sebaliknya.

BBM merupakan salah satu kebutuhan primer, dimana apabila harga BBM meningkat maka akan mempengaruhi beberapa aspek salah satunya yaitu meningkatnya harga kebutuhan pokok. Hal ini tentunya akan berdampak pada konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan untuk mengonsumsi makanan, sehingga hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Perubahan harga BBM ini lebih terasa dampaknya kepada masyarakat menengah bawah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



Keterangan:

1.  : Hubungan secara parsial
2.  : Hubungan secara simultan
3. Perubahan Harga BBM Subsidi (X₁) : Variabel bebas (*Independent variable*)
4. Inflasi (X₂) : Variabel bebas (*Independent variable*)
5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) : Variabel terikat (*Dependent variable*)

2.4 Pengaruh Perubahan Harga BBM Subsidi terhadap Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga

Kenaikan harga BBM menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh negara. Meningkatnya harga minyak dunia membuat peningkatan pada harga BBM yang mengharuskan pemerintah melakukan peningkatan pada anggaran subsidi. Pemberian subsidi tersebut tentunya akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tertekan dikarenakan subsidi yang diberikan semakin meningkat. Sehingga dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terhambat oleh kenaikan harga minyak dunia (Samah & Nuryati, 2019).

Perubahan harga BBM khususnya subsidi membuat masyarakat secara luas merasa tertekan. Hal tersebut tentunya sangat dirasakan oleh golongan masyarakat menengah bawah. Di samping itu, kebutuhan akan BBM semakin meningkat tiap tahunnya, namun tidak diimbangi oleh produksi minyak yang tiap tahunnya semakin menurun. Kenaikan harga BBM dapat menimbulkan naiknya harga barang-barang secara umum. Hal tersebut berdampak pada pengeluaran konsumsi masyarakat karena perlu melakukan penyesuaian pola konsumsi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, konsumsi rumah tangga tahun 2022 tertahan salah satunya disebabkan oleh naiknya harga BBM sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Meningkatnya harga BBM mengakibatkan inflasi meningkat sehingga berdampak pada tertahannya konsumsi masyarakat (Perwitasari, 2023).

Inflasi yang meningkat akibat dari kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan akhirnya konsumsi rumah tangga juga ikut menurun. Diketahui bahwa konsumsi menjadi salah satu penopang pertumbuhan di Indonesia. Menurunnya konsumsi rumah tangga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan tingkat inflasi supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga (Hadijah, 2022).

Konsumsi rumah tangga menjadi penguat perekonomian di tengah ancaman resesi. Praktisi bisnis dan juga founder IndoSterling Group, William Henley, menyatakan bahwa benteng kuat yang melindungi Indonesia dari ancaman krisis global adalah ekonominya, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

2.5 Pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Diperlukan perhatian khusus pada konsumsi rumah tangga dikarenakan beberapa alasan (Rizki, 2021), yaitu:

1. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan nasional.
2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana aktivitas ekonomi berkembang dari waktu ke waktu.

Konsumsi rumah tangga bersifat endogen, yang berarti bahwa tingkat yang tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah variabel lain yang dapat mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga adalah daya beli. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya beli yaitu pendapatan dan inflasi. Pendapatan tiap individu akan mempengaruhi

kemampuan daya belinya. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan harga. Meningkatnya harga-harga umum barang dan jasa akan menurunkan daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat akan berpengaruh pada berkurangnya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa (Rizki, 2021).

Kenaikan barang secara umum dan fakta bahwa sebagian besar bahan baku adalah produk dari negara lain yang diperoleh melalui kegiatan impor, tingkat inflasi dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan tingkat produktivitas. Jika kenaikan pendapatan tidak segera diikuti dengan peningkatan daya beli, maka pendapatan riil akan menyusut. Hal ini akan menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat, yang kemudian akan berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Almaya *et al.*, 2021).

Di Indonesia, Interaksi antara penawaran dan permintaan berdampak pada perubahan inflasi inti. Oleh karena itu, penurunan konsumsi masyarakat diindikasikan oleh inflasi inti yang rendah (Yolandha, 2021). Menurut Ragandhi (2012) inflasi menjadi suatu determinan dari konsumsi dimana inflasi telah diketahui bahwa memberikan dampak pada produsen, masyarakat, dan perbankan.

Konsumsi dan inflasi merupakan dua indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Sementara konsumsi adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional dan juga dapat memengaruhi variasi dalam perekonomian suatu negara, inflasi

adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas ekonomi suatu negara (Ermija Oktavia & Amri, 2017).

2.6 Hipotesis

Menurut Setyawan (2014) Hipotesis ialah jawaban sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis yang dapat diperkirakan yaitu:

1. H_0 : Perubahan harga BBM subsidi berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.
 H_a : Perubahan harga BBM subsidi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.
2. H_0 : Inflasi berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.
 H_a : Inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.
3. H_0 : Perubahan harga BBM subsidi dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Inflasi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Surabaya” menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif ialah penelitian yang datanya dianalisis menggunakan analisis statistik. Menurut Rubianto (2009) kuantitatif ialah penelitian dengan data berupa angka yang diperuntukkan sebagai alat dalam menemukan sebuah keterangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dilakukannya penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti (Andola, 2016). Peneliti memilih Kota Surabaya menjadi lokasi untuk dilaksanakannya penelitian. Waktu pengerjaan penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan, dimana 1 bulan digunakan untuk pengumpulan data dan 1 bulan untuk pengolahan data. Waktu pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dilihat berdasarkan kondisi lapangan.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019) Definisi operasional variabel merupakan suatu atribut dari obyek yang memiliki variasi yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.3.1 Variabel *Independent*

Variabel *independent* atau variabel bebas ialah variabel yang menyebabkan timbulnya variabel terikat (*dependent variable*) (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini variabel bebas (X_1) yaitu perubahan harga BBM dan inflasi (X_2).

3.3.2 Variabel *Dependent*

Variabel terikat (*dependent variable*) ialah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas atau terjadinya dikarenakan pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat (Y) yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data ialah suatu keterangan berupa informasi dalam berbentuk angka, huruf, kata-kata maupun simbol untuk menginterpretasikan objek, manusia, peristiwa dan objek lainnya (Darmoyo, 2020). Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dalam mendukung pengaplikasian penelitian, sebagai berikut:

3.4.1 Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersumber secara tidak langsung kepada pengumpul data dan didapatkan dari institusi tertentu (Sugiyono, 2015). Data sekunder yang digunakan ialah data perubahan harga BBM, inflasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan *time series* dari tahun 2001 sampai tahun 2022 yang didapatkan dari referensi buku, jurnal penelitian, artikel, Kementerian ESDM, website resmi Pertamina serta BPS Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan pada penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah, 2012). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.5.1 Studi Literatur

Studi literatur digunakan sebagai penghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Studi literatur dapat bersumber dari sumber pustaka atau dokumen (Melfianora, 2019).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah perkiraan atau penentuan besarnya pengaruh secara kuantitatif terhadap kejadian satu dengan kejadian lainnya (Hasan, 2006). Pada kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data dari seluruh responden dan sumber data telah tersedia. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data menjadi lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data pada variabel apabila dalam teori pada variabel yang diteliti termasuk dalam variabel berdistribusi normal (Irianto, 2007). Dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov* guna

mengetahui normal atau tidak data yang digunakan. Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data terdistribusi secara normal
- b. Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal

3.6.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan adanya uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Rudi, 2020). Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas saling berkorelasi (Perdana, 2016). Indikator yang akan diperlihatkan yaitu toleransi $> 0,10$ dan $\text{VIF} < 10,00$ memperlihatkan tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1) (Junaidi, 2013). Model regresi yang baik apabila tidak terjadi

autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan indikator menurut Ghozali (2018) sebagai berikut:

- a. Apabila $0 < d < d_L$, maka tidak terdapat autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.
- b. Apabila $d_L < d < d_U$, maka tidak terdapat autokorelasi positif dengan keputusan no decision.
- c. Apabila $4 - d_L < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif dengan keputusan ditolak.
- d. Apabila $4 - d_U < d < 4 - d_L$, maka tidak ada korelasi negatif dengan keputusan no decision.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat (Perdana, 2016). Persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 dari hasil perhitungan regresi memperlihatkan seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (Rudi, 2020).

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel terikat memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel bebas (Junaidi, 2013). Indikator dalam uji ini yaitu:

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan signifikansi $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.7.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t diartikan sebagai sejauh mana pengaruh dari variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat secara individu (Azwai *et al.*, 2019). Pengukurannya menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) dan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dengan hipotesis menurut Ghozali (2013) sebagai berikut:

- a. Apabila signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Apabila signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Surabaya

4.1.1 Geografi

Kota Surabaya merupakan ibukota dari Jawa Timur dan juga merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dengan populasi yang menempatnya sekitar 3 juta jiwa. Surabaya terletak di antara 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' sampai dengan 112°54' Bujur Timur. Surabaya terletak di tepi pantai utara Jawa Timur yang berbatasan dengan Selat Madura disisi utara dan timur, sisi utara Laut Jawa, sisi selatan yaitu Kabupaten Sidoarjo, dan sisi barat yaitu Kabupaten Gresik. Iklim di Surabaya cenderung panas dan kering dikarenakan letak Surabaya yang berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 3-6 meter di atas permukaan laut (Perwali Surabaya, 2017).

Kota Surabaya memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 326,36 km². Surabaya memiliki peran yang penting dalam melakukan perdagangan di kawasan nasional hingga internasional sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, letak Kota Surabaya sangat strategis dengan menghubungkan Kota Surabaya dengan kota-kota sekitarnya sehingga mendukung percepatan pembangunan Kota Surabaya. Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan

dengan jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) masing-masing sebanyak 1.361 dan 9.131 (Perwali Surabaya, 2022).

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan di Kota Surabaya

Kecamatan di Kota Surabaya					
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Asemrowo	15,32	17.	Pakal	19,07
2.	Benowo	25,11	18.	Rungkut	22,74
3.	Bubutan	3,95	19.	Sambikarep	16,72
4.	Bujak	5,66	20.	Sawahan	7,07
5.	Dukuh Pakis	10,95	21.	Semampir	8,70
6.	Gayungan	5,51	22.	Simokerto	2,77
7.	Genteng	14,12	23.	Sukolilo	28,72
8.	Gubeng	7,80	24.	Sukomanunggal	9,29
9.	Gunung Anyar	9,77	25.	Tambaksari	9,30
10.	Jambangan	4,54	26.	Tandes	9,76
11.	Karang Pilang	9,98	27.	Tegalsari	4,29
12.	Kenjeran	8,73	28.	Tenggilis Mejoyo	5,85
13.	Krembangan	8,73	28.	Wiyung	11,39
14.	Lakarsantri	19,27	30.	Wonocolo	6,54
15.	Mulyorejo	12,77	31.	Wonokromo	8,32
16.	Pabean Cantian	5,58			

Sumber: Peraturan Walikota Surabaya, 2022

4.1.2 Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada 31 Desember 2021 jumlah penduduk yang ber-NIK di Kota Surabaya sebesar 2.970.952 jiwa yang terbesar di 31 kecamatan. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 20.000

jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Simokerto dengan 33.108 jiwa/km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Benowo yaitu 2,839 jiwa/km². Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi (BPS Kota Surabaya, 2022a).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki (Juta jiwa)	Wanita (Juta jiwa)
2017	1.534.438	1.540.445
2018	1.541.738	1.552.994
2019	1.570.857	1.588.624
2020	1.473.988	1.496.742
2021	1.472.817	1.498.135

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam tahun 2017-2021 penduduk Surabaya didominasi oleh wanita. Jumlah penduduk Surabaya berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.498.135 jiwa atau sebesar 50,43% penduduk wanita dan 1.472.817 jiwa atau sebesar 49,57% penduduk laki-laki. Berdasarkan usia, penduduk terbanyak yang menempati Surabaya yaitu termasuk dalam kelompok milenial atau rentang usia 40-25 tahun dengan jumlah sebesar 916.482 jiwa (BPS Kota Surabaya, 2022b).

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, penduduk Surabaya berdasarkan pekerjaan hampir seluruhnya menyebar ke berbagai jenis pekerjaan. Total keseluruhan terdapat 83 pekerjaan dengan jumlah penduduk terbanyak

yaitu di status belum/tidak bekerja sebesar 29,09 persen atau 864.333 jiwa. Posisi kedua yaitu karyawan swasta dengan jumlah 803.328 jiwa atau sebesar 27,04 persen dan posisi ketiga yaitu mengurus rumah tangga sebesar 17,83 persen atau 529.790 jiwa (BPS Kota Surabaya, 2022a).

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Persentase (%)
Belum/Tidak Bekerja	864.333	29,09
Karyawan Swasta	803.328	27,04
Mengurus Rumah Tangga	529.790	17,83
Pelajar Mahasiswa	440.088	14,82
Wiraswasta	155.692	5,24

Sumber: BPS Surabaya, 2022

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	Persentase (%)
Tidak/belum sekolah	787.338	26,5
Belum tamat SD	223.414	7,52
SD/setara	417.981	14,07
SMP/setara	357.518	12,04
SMA/setara	818.549	27,55
D1/D2	17.361	0,58
D3	39.887	1,34
D4/S1	287.516	9,68
S2	19.976	0,67
S3	1.412	0,05
Jumlah	2.970.952	100

Sumber: BPS Surabaya, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, Pendidikan yang ditempuh penduduk Surabaya dengan sejumlah 2.970.952 jiwa, rata-rata tertinggi yaitu dengan lulusan di tingkat SMA/ sederajat dengan jumlah 818.549 jiwa atau sebesar 27,55 persen. Posisi kedua yaitu tidak/belum sekolah sejumlah 787.338 jiwa atau 26,5 persen dan posisi ketiga yaitu lulusan SD/ sederajat dengan jumlah 417.981 jiwa atau sebesar 14,07 persen (BPS Kota Surabaya, 2022a).

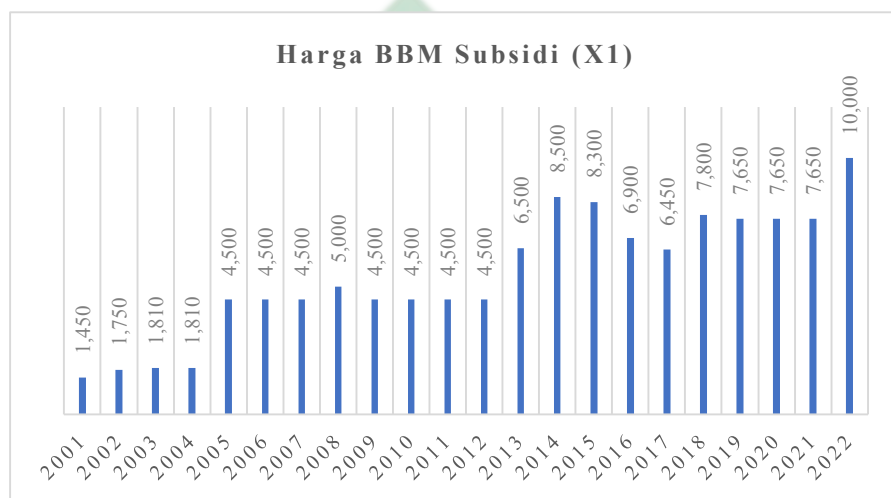
4.2 Perubahan Harga BBM Subsidi

Perubahan pada harga BBM khususnya subsidi menjadi sebuah masalah dalam perekonomian baik bagi pemerintah hingga masyarakat luas. BBM subsidi jenis pertalite menjadi salah satu energi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia terbanyak pada saat ini. Pemerintah selaku penentu harga resmi untuk PT. Pertamina harus bisa menetapkan harga BBM subsidi ini untuk tetap dapat dijangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah.

Berdasarkan perkembangan harga BBM subsidi selama 2001 hingga 2022, dapat dilihat bahwa hampir tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2015, BBM subsidi didominasi oleh BBM jenis Premium. Dari Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa harga BBM jenis premium kala itu cenderung stabil. Harga terendah kala itu terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp1.450 dan terjadi kenaikan tertinggi di tahun 2005 yang kala itu harga BBM jenis premium seharga Rp4.500 per liter.

Ketika masa pemerintahan Presiden Megawati, kondisi perekonomian Indonesia terbilang labil. Dengan naiknya harga minyak dunia yaitu sebesar

US\$150 per barel, Presiden Megawati tetap mempertahankan harga BBM tetap di harga Rp1.810 per liter. Tetapi, ketika awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hal tersebut sangat memberatkan perekonomian Indonesia dikarenakan melihat harga minyak dunia telah naik sebesar 2 kali lipat dari sebelumnya (Tifada, 2022).



Sumber: Kementerian ESDM dan Pertamina, data diolah

Gambar 4.1

Perubahan Harga BBM 2001-2022

Dari hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan yaitu dengan menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali pada tahun 2005 yaitu di bulan Maret dari Rp1.810 menjadi Rp2.400 dan bulan Oktober dari Rp2.400 menjadi Rp4.500 atau kenaikan sekitar 87 persen. Hal ini menjadi kenaikan harga BBM tertinggi di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dari kenaikan tersebut membuat angka kemiskinan semakin meningkat melihat dari ikutnya harga barang-barang lainnya akibat naiknya harga BBM premium. Di lain sisi, pemerintah juga merasa terberatkan dengan meningkatnya anggaran untuk subsidi kala itu yang mencapai Rp53,4 triliun (Tifada, 2022).

Pada tahun 2013, BBM jenis premium ini mengalami peningkatan kembali menjadi Rp6.500 per liter. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesinambungan perekonomian nasional yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2013 tentang APBN-P. Krisis global kala itu menyebabkan dampak negatif pada kondisi perekonomian nasional. Harga minyak dunia yang mengalami peningkatan serta konsumsi BBM yang semakin meningkat, membuat anggaran untuk subsidi BBM mencapai hampir Rp300 triliun dan anggaran mengalami defisit hingga 3 persen. Pemerintah menyadari peningkatan tersebut menyebabkan inflasi yang membuat daya beli masyarakat menurun (*Riyandi et al.*, 2013). Di tahun berikutnya, BBM jenis premium mengalami peningkatan kembali menjadi Rp8.500 per liter.

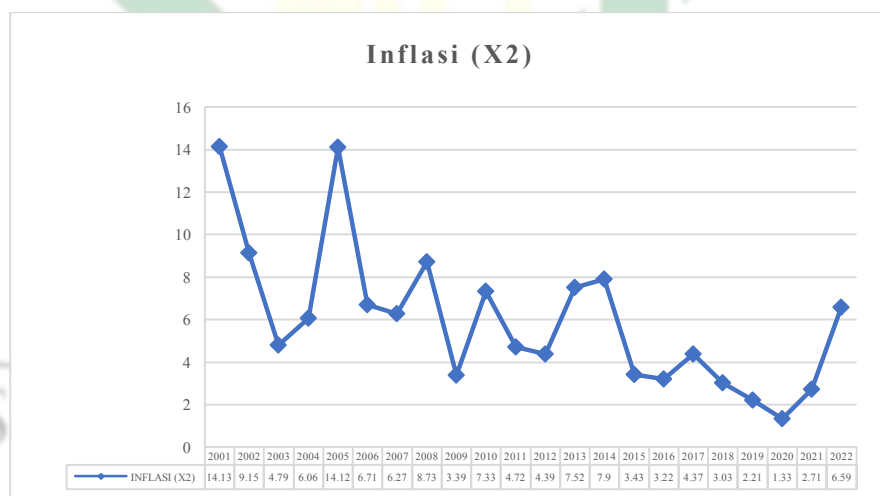
BBM jenis pertalite diresmikan pertama kali oleh pemerintah pada tahun 2015 ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama kali muncul harga pertalite di jual sebesar Rp8.400 per liter. Kala itu BBM jenis pertalite masih belum diresmikan menjadi BBM subsidi. Pada 1 Oktober 2015, harga pertalite mengalami penurunan sebanyak Rp100 yaitu menjadi Rp8.300 per liter. Pada tahun 2016, harga pertalite mengalami penurunan dengan seharga Rp6.900 per liter. Premium masih menjadi BBM subsidi yang laris di pasaran dikarenakan harganya paling murah dibandingkan dengan jenis BBM lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, posisi BBM jenis premium mulai tersingkirkan dan digantikan oleh pertalite (Anwar, 2022).

Pertalite menjadi BBM subsidi pengganti premium sejak 10 Maret 2022 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP) (Anwar, 2022). Pada September 2022, harga BBM jenis pertalite meningkat mencapai Rp10.000 per liter. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya harga minyak dunia pada bulan Maret 2022 yang mencapai US\$113,50 per barel.

4.3 Inflasi

Inflasi dapat disebabkan salah satunya yaitu kenaikan harga BBM. BBM menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia karena rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan transportasi pribadi yang membutuhkan BBM sebagai bahan penggerak mesinnya. Hal tersebutlah yang dapat menentukan turun dan naiknya tingkat inflasi yang dialami oleh negara.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah

Gambar 4.2

Inflasi Umum Kota Surabaya 2001-2022

Berdasarkan Gambar 4.2, tingkat inflasi di Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan. Dimulai dari tahun 2001, secara kumulatif inflasi di Surabaya mencapai 14,13 persen. Inflasi yang terjadi di Surabaya disebabkan oleh naiknya

beberapa bahan pokok dan barang lainnya, seperti beras, daging ayam, rokok kretek, daging sapi, dan tarif listrik. Pada Desember 2001, inflasi terjadi dikarenakan naiknya harga bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (BPS Jatim, 2002).

Inflasi tinggi terjadi lagi pada tahun 2005 yaitu mencapai 14,12 persen. Inflasi yang terjadi kala itu disebabkan oleh adanya perubahan harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah seperti harga BBM, tarif dasar listrik, minyak tanah, dan LPG. Namun dari adanya kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah masih mampu meminimalkan angka inflasi yang dimana masih di bawah inflasi Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing mencapai 15,19 persen dan 17,11 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, inflasi di Surabaya cenderung stabil di kisaran angka 6 persen (Bappeko Surabaya, 2010).

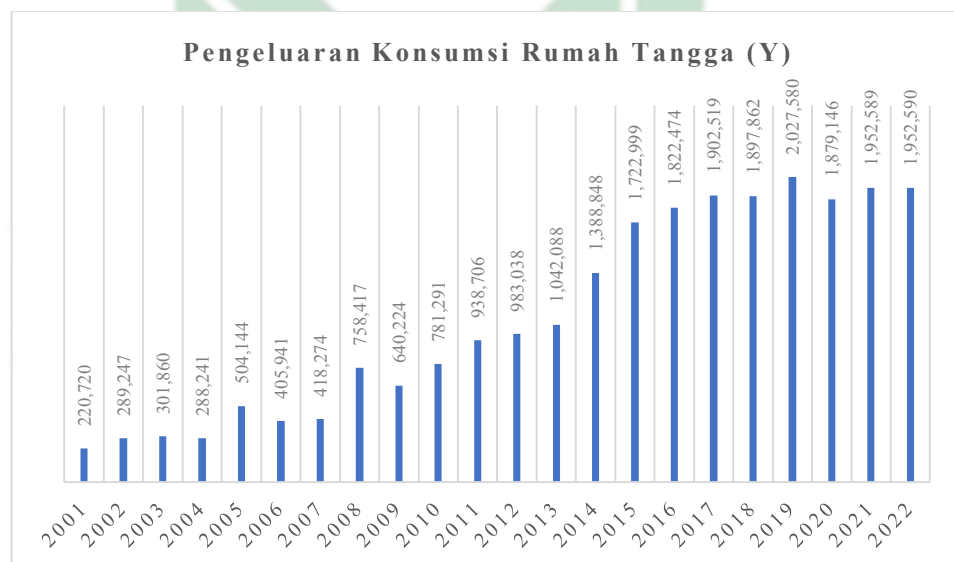
Di tahun-tahun berikutnya angka inflasi cenderung stabil dan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, inflasi Surabaya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,33 persen. Inflasi tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami sebesar 5,08 persen. Kelompok transportasi mengalami deflasi terendah yaitu sebesar 0,22 persen (BPS Surabaya, 2021b).

Inflasi yang terjadi pada tahun 2022 salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada bulan September. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi ada bensin, beras, dan rokok kretek filter. Di antara delapan kota IHK Jawa Timur, Surabaya

menjadi urutan kedua inflasi tertinggi dengan angka sebesar 6.59 persen (BPS Jatim, 2022).

4.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Meningkatnya harga BBM yang dapat mengakibatkan inflasi di suatu daerah, membuat daya beli masyarakat ikut terganggu yang akhirnya membuat pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin bertambah diikuti dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu kekuatan dalam perekonomian dikarenakan dari konsumsi menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan nasional hingga regional. Apabila konsumsi rumah tangga terganggu, maka tingkat perekonomian semakin menurun dan menandakan bahwa negara atau daerah tersebut masyarakatnya kurang sejahtera.



Sumber: BPS Kota Surabaya, data diolah

Gambar 4.3

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Kota Surabaya 2001-2022

Dari Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya pada tiap bulannya mengalami peningkatan. Hal ini juga diikuti dengan semakin meningkatnya harga-harga barang untuk kebutuhan sehari-hari yang membuat pengeluaran untuk konsumsi semakin meningkat. Diketahui bahwa Surabaya termasuk dalam kota besar yang dimana pengeluaran per bulannya tidak cukup hanya sebesar Rp199.999.

Pengeluaran konsumsi terbagi menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Melihat dari perkembangannya, konsumsi di Surabaya mulai beralih dari konsumsi makanan ke konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang didapatkan oleh seseorang. Perubahan konsumsi ini juga memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya mengalami peningkatan.

Dimulai pada tahun 2001 yang menunjukkan pengeluaran konsumsi makanan sebesar Rp113.587 sedangkan untuk konsumsi bukan makanan sebesar Rp107.133. Pada tahun 2003 konsumsi makanan mengalami penurunan sebesar Rp137.881 dan konsumsi bukan makanan mengalami peningkatan sebesar Rp163.979 (BPS Jatim, 2005). Pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan hal yang sama yaitu tingkat pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanannya.

Adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, membuat angka konsumsi masyarakat mengalami penurunan tidak terkecuali Surabaya. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran konsumsi selama sebulan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp1.879.146. Pengeluaran untuk konsumsi makanan kala itu hanya sebesar Rp777.725 dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp1.101.421. Padahal pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran selama sebulan sebesar Rp2.027.580 (BPS Surabaya, 2021a). Pandemi *Covid-19* membuat seluruh kegiatan perekonomian terhambat. Pembatasan akses jalan antar kota dan pembatasan kegiatan di luar rumah membuat perusahaan mengalami kebangkrutan dan para pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal tersebut tentunya berdampak pada konsumsi masyarakat pada saat itu.

Pada tahun 2021, pandemi *Covid-19* mulai mereda sehingga kegiatan masyarakat yang awalnya mengalami pembatasan berangsur-angsur kembali seperti semula dan perekonomian mulai berjalan dengan baik diikuti dengan penerapan protokol kesehatan kala itu. Pada tahun tersebut, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan menunjukkan peningkatan seiring dengan menguatnya kondisi perekonomian nasional hingga regional. Pengeluaran konsumsi makanan menunjukkan peningkatan sebesar Rp810.743 dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp1.141.846 dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.952.589. Hal serupa ditunjukkan pada tahun 2022 dengan pengeluaran konsumsi makanan sebesar Rp819.134 dan konsumsi bukan makanan sebesar Rp1.149.824 dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.952.590 (BPS Surabaya, 2022).

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan data pada variabel apabila dalam teori pada variabel yang diteliti termasuk dalam variabel berdistribusi normal. Berikut hasil dari uji normalitas data.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	254419.9150057
		7
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.073
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil data diolah, Mei 2023

Berdasarkan hasil uji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* di spss, menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar $0,200 > 0,05$. Hal ini diartikan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan valid.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas saling berkorelasi. Berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Harga BBM	.787	1.271
	Inflasi	.787	1.271

a. Dependent Variable: Konsumsi Rumah

Tangga

Sumber: Hasil data diolah, Mei 2023

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS, menunjukkan hasil dari tiap variabel dengan nilai tolerance lebih dari 0,10. VIF harga BBM (X1) $1,271 < 10,00$ dan nilai VIF inflasi (X2) $1,271 < 10,00$. Dari data tersebut terlihat bahwa $VIF < 10,00$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas atau model uji regresi layak.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan adanya uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	141560.380	149481.739		.947	.356
	Harga BBM	3.095	17.497	.046	.177	.861
	Inflasi	5434.551	12306.520	.114	.442	.664

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil data diolah, Mei 2023

Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan hasil yaitu nilai dari harga BBM (X1) sebesar $0,861 > 0,05$ dan nilai dari inflasi sebesar $0,664 >$

0,05. Dari perhitungan data di atas, maka dapat diartikan bahwa seluruh variabel tidak mengalami heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

4.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1).

Berikut hasil perhitungan untuk uji autokorelasi.

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.860	.845	267475.464	.942
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Harga BBM					
b. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga					

Sumber: Hasil data diolah, Mei 2023

Berdasarkan perhitungan dari tabel di atas, dengan $n = 22$ dan $d = 0,942$ dengan nilai signifikansi 0,05. Didapatkan hasil $dL = 1,147$; $dU = 1,541$; $4 - dL = 2,853$ dan $4 - dU = 2,459$. Dapat disimpulkan bahwa $0 < d < dL$ atau $0 < 0,942 < 1,147$ yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.

4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

4.6.1 Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y) secara simultan (bersama-sama).

Tabel 4.9 Uji f (Simultan) Harga BBM Subsidi (X1) dan Inflasi (X2) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
1	Regression	8364772976815.004	2	4182386488407.502	58.460	3.52	.000 ^b
	Residual	1359319356182.452	19	71543124009.603			
	Total	9724092332997.455	21				
a. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga							
b. Predictors: (Constant), Inflasi, Harga BBM							

Sumber: Hasil olah data, Mei 2023

Berdasarkan perhitungan pada data di atas, diketahui nilai signifikansi pada variabel harga BBM subsidi (X1), inflasi (X2) dan konsumsi (Y) yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai F hitung $58,460 > F$ tabel 3,52. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel harga BBM subsidi (X1) dan inflasi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga (Y).

4.6.2 Uji t (Parsial)

Uji t diartikan sebagai sejauh mana pengaruh dari variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat secara individu. Hasil perhitungan dari uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh harga BBM subsidi terhadap konsumsi rumah tangga

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel perubahan harga BBM subsidi (X1) terhadap variabel konsumsi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung $8,004 > t$ tabel 2,093. Maka dapat disimpulkan bahwa harga

BBM subsidi berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Surabaya.

Tabel 4.10 Uji t (Parsial) Variabel Harga BBM Subsidi (X1) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	219119.149	234833.785		.933		.362
	Harga BBM	220.004	27.487	.774	8.004	2.093	.000
	Inflasi	-53174.231	19333.376	-.266	-2.750	2.093	.013
a. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga							

Sumber: Hasil olah data, Mei 2023

2. Pengaruh Inflasi terhadap konsumsi rumah tangga

Tabel 4.11 Uji t (Parsial) Variabel Inflasi (X1) terhadap Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	219119.149	234833.785		.933		.362
	Harga BBM	220.004	27.487	.774	8.004	2.093	.000
	Inflasi	-53174.231	19333.376	-.266	-2.750	2.093	.013
a. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga							

Sumber: Hasil data olah, Mei 2023

Berdasarkan hasil uji t di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel inflasi (X2) terhadap variabel konsumsi (Y) adalah sebesar $0,013 > 0,05$ dan $t_{hitung} -2,750 < t_{tabel} 2,093$. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Surabaya.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya pengaruh harga BBM subsidi dan inflasi terhadap konsumsi rumah tangga koefisien determinasi (R^2) simultan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.860	.845	267475.464
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Harga BBM				
b. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga				

Sumber: Hasil data olah, Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,860 hal ini berarti bahwa pengaruh perubahan harga BBM subsidi (X1) dan inflasi (X2) terhadap konsumsi rumah tangga (Y) yaitu sebesar 86%.

4.6.4 Hasil Estimasi Koefisien Regresi Linier Berganda

Tabel 4.13 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	219119.149	234833.785		.933	.362
	Harga BBM	220.004	27.487	.774	8.004	.000
	Inflasi	-53174.231	19333.376	-.266	-2.750	.013
a. Dependent Variable: Konsumsi rumah tangga						

Sumber: Hasil olah data, Mei 2023

$$Y = 219119,149 + 220,004(X1) - 53174.231(X2)$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda didapatkan bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 219119,149 yang berarti bahwa apabila seluruh variabel dianggap konstan

maka konsumsi rumah tangga adalah 219119,149. Perubahan harga BBM subsidi memiliki pengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan positif dimana apabila terjadi perubahan harga BBM subsidi sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 220,004. Sedangkan pada variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga dan memiliki hubungan negatif. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen maka meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53174,231.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka berikut ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian:

4.7.1 Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Secara Simultan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa perubahan harga BBM subsidi dan inflasi secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji F sebesar 58,460 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Dalam perekonomian terdapat beberapa variabel yang mampu memberikan pengaruh pada satu sama lain. Perubahan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan pengaruh terhadap inflasi. Inflasi sering dikaitkan dengan angka konsumsi domestik itu sendiri.

Kenaikan inflasi mampu mempengaruhi daya beli masyarakat yang akhirnya menurunkan konsumsi masyarakat atas barang dan jasa.

Terdapat beberapa komoditi yang memiliki intervensi terhadap pemerintah, salah satunya yaitu BBM. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penentu dalam permintaan dan penawaran pada suatu barang. Kebijakan pemerintah terkait harga BBM ini dibuat untuk mempertahankan perekonomian pada suatu negara. Walaupun pengeluaran anggaran mengalami defisit, langkah tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah supaya perekonomian tetap stabil.

Naiknya harga BBM tentunya memberatkan masyarakat terutama masyarakat menengah bawah. Oleh karena itu, selain memberikan kebijakan mengenai kenaikan harga BBM, pemerintah juga memberikan subsidi untuk beberapa jenis BBM supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Melihat dari meningkatnya pengguna kendaraan bermotor sehingga menyebabkan konsumsi BBM subsidi semakin bertambah, pemerintah perlu melakukan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar jenis subsidi pada kendaraan tertentu. Pertamina selaku perusahaan minyak di bawah naungan pemerintah, membuat sebuah aplikasi untuk dapat mengendalikan konsumsi BBM subsidi ini. Adanya aplikasi ini diharapkan mampu mengontrol pemakaian BBM subsidi dan dapat tepat sasaran untuk golongan masyarakat menengah bawah.

Salah satu akibat dari tingginya tingkat inflasi yaitu meningkatnya harga BBM berdasarkan kebijakan dari pemerintah. Hal tersebut sesuai

dengan pernyataan dari Pakar Ekonomi UM Surabaya Arin Setyowati yang menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi disebabkan oleh adanya kontraksi biaya produksi yang meningkat akibat dari kenaikan harga bahan baku seperti BBM (Uswah, 2022). Saat ini, BBM menjadi salah satu kebutuhan penting bagi banyak masyarakat. Naiknya harga minyak dunia yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga BBM nasional membuat guncangan inflasi yang tidak menentu. Naiknya harga BBM dapat memberikan dampak pada harga-harga kebutuhan pokok dan beberapa kebutuhan lainnya. Inflasi dapat diketahui salah satunya melalui angka Indeks Harga Konsumen (IHK).

Salah satu dampak dari tingginya inflasi yaitu menurunnya daya beli masyarakat sesuai dengan pernyataan dari (Utari *et al.*, 2015). Untuk mempertahankan daya beli masyarakat tetap stabil, pemerintah memberikan subsidi pada BBM salah satunya jenis pertalite. Ketergantungan masyarakat terhadap BBM semakin meningkat, yang membuat pemerintah perlu melakukan impor. Dengan pemberian subsidi ini memberikan keuntungan bagi konsumen namun memberikan kerugian bagi produsen maupun pemerintah dikarenakan beban APBN untuk anggaran energi semakin menambah. Namun dengan begitu banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan subsidi ini karena harganya masih dapat terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah.

Walaupun harga BBM naik dan membuat daya beli masyarakat menurun, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa BBM menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat pada saat ini. Walaupun daya beli masyarakat menurun, namun konsumsi terhadap BBM jenis pertalite ini tidak turun. Hal tersebut dikarenakan rata-rata masyarakat sangat bergantung pada BBM tersebut meskipun pengeluaran konsumsinya semakin meningkat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sesuai dengan konsep teori kausalitas antara konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa apabila berkurangnya pasokan energi maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau mampu memperburuk kinerja perekonomian. Menurut Stern (2000) energi menjadi salah satu faktor pembatas pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian harga BBM subsidi serta tekanan terhadap beberapa golongan masyarakat pengguna akan menyebabkan katalis negatif bagi kinerja Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini sesuai dengan yang telah diprediksikan yaitu apabila harga BBM mengalami kenaikan, inflasi akan meningkat hingga mencapai lebih dari 5 persen. Sehingga hal tersebut membuat beban pengeluaran masyarakat semakin bertambah serta daya beli semakin menurun yang membuat konsumsi rumah tangga terkoreksi turun.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim & Fadilla (2021) yang menyatakan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan

naiknya harga BBM dan sembako serta menurunnya minat beli masyarakat Indonesia.

4.7.2 Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Secara Parsial.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa perubahan harga BBM subsidi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 dimana kurang dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 8,004. Koefisien regresi dari variabel harga BBM subsidi (X_1) yaitu 220,004. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan harga BBM subsidi sebanyak 1 rupiah maka pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 220,004.

Hal ini sesuai dengan pemikiran teori dari Irving Fisher yang menyatakan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh individu tentunya akan dibagi untuk dikonsumsi dan ditabung, namun dapat melihat kondisi yang akan datang. Teori Keynes menyatakan bahwa pendapatan seseorang akan berbanding lurus dengan konsumsi dan tabungannya. Dari kasus ini dapat dibuktikan bahwa naiknya harga BBM subsidi tentunya membuat golongan masyarakat khususnya menengah bawah merasa tertekan dikarenakan pengeluaran untuk konsumsi meningkat, sehingga hal tersebut membuat mereka tidak mampu membagi sebagian pendapatannya untuk ditabung justru mengurangi tabungan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pigome *et al.* (2019) dan Tusri (2017) yang menyatakan bahwa harga BBM khususnya subsidi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat. Meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat dapat menentukan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut. Walaupun daya beli masyarakat menurun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa BBM menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu menjadi perhitungan pengeluaran rumah tangga untuk dikonsumsi per bulannya. Sehingga kenaikan harga BBM khususnya subsidi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulannya.

Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian dari (Wiranthi, 2014) dengan analisis determinan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia didapatkan hasil yaitu kenaikan harga BBM berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap konsumsi rumah tangga yang berarti bahwa setiap kenaikan harga BBM maka pengeluaran konsumsi rumah tangga secara makro mengalami penurunan sebesar -10674,54 miliar, *ceteris paribus*.

Berdasarkan perhitungan inflasi terhadap konsumsi rumah tangga, didapatkan hasil yaitu inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,013 yang berarti lebih besar dari pada 0,05 dan nilai t-hitung -2,750. Koefisien regresi dari inflasi (X_2) yaitu sebesar -53174,231. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi penurunan

inflasi sebesar 1 persen maka meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53174,231.

Menurut teori inflasi, jika harga barang dan jasa meningkat dan terjadi inflasi, hal ini akan mengakibatkan penurunan nilai aktual dari pendapatan, sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan yaitu inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap konsumsi rumah tangga.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina (2022) mengenai analisis pengaruh angkatan kerja dan inflasi terhadap konsumsi masyarakat yang menyatakan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia dengan nilai signifikansi $0,939 > 0,025$ dan t hitung sebesar $0,139 < t$ tabel 2,228. Sehingga didapatkan hipotesis berupa H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Alfiarinda (2021) mengenai analisis pengaruh pendapatan dan inflasi barang terhadap konsumsi rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto didapatkan hasil yaitu inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,042 > 0,05$ dan t hitung $-4,455 < t$ tabel 1,995 sehingga hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa dalam perekonomian apabila mengalami inflasi tinggi belum tentu menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Naiknya harga barang secara keseluruhan, masyarakat tetap mengonsumsi barang-barang yang masih dibutuhkan seperti bahan pokok, pakaian, dan lain sebagainya. Di lain sisi jika terjadi inflasi tinggi, masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi barang mewah atau barang yang belum dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan teori inelastisitas permintaan yang menyatakan bahwa apabila terdapat perubahan harga pada suatu produk, maka permintaan produk tersebut tidak akan berdampak signifikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel harga BBM subsidi dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F sebesar 58,460 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,860 yang berarti bahwa pengaruh perubahan harga BBM subsidi dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Surabaya yaitu sebesar 86 persen.
2. Variabel harga BBM subsidi (X1) memiliki pengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap konsumsi rumah tangga (Y) dengan nilai t hitung 8,004. Hal ini menyatakan bahwa setiap peningkatan harga BBM subsidi sebanyak 1 rupiah maka pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 220,004. Sedangkan variabel inflasi (X2) berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap konsumsi rumah tangga (Y) dengan nilai t hitung -2,750. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi penurunan inflasi sebesar 1 persen maka meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53174,231.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian

ini tentunya memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian penggunaan sampel hanya 22 sampel. Hal ini dikarenakan data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya maupun BPS Provinsi Jawa Timur baru memiliki data pengeluaran konsumsi perkapita per bulan selama 22 tahun yang berarti mulai dari 2001 hingga 2022. Tentunya dari jumlah data yang didapatkan masih kurang dari yang seharusnya ditargetkan.

5.3 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diambil berdasarkan pemaparan di atas, sebagai berikut:

- 5.3.1 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan riset mengenai tersedianya data yang telah terpublikasi sehingga data yang akan diteliti lebih akurat.
- 5.3.2 Diharapkan untuk mampu menambahkan variabel lainnya sehingga ke depannya mungkin mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.
- 5.3.3 Bagi pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi akibat dari adanya perubahan harga pada BBM khususnya yang bersubsidi supaya daya beli masyarakat tetap stabil dan konsumsi menjadi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Pengantar ekonomi makro. In *Terjemahan Chriswan Sungkono*. Jakarta: Salemba Empat. CV. Latinulu.
- Alfiarinda, D. (2021). *Analisis Pengaruh Pendapatan dan Inflasi Barang Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Almaya, U. N., Rianto, W. H., & Hadi, S. (2021). Pengaruh Harga Minyak Dunia, Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 262–278.
- Andola, Y. (2016). *Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Bandung*.
- Anwar, M. C. (2022). *Naik Turun Harga Pertalite dari Tahun ke Tahun Sejak Dirilis pada 2015*.
- Ariani, M. (2007). *Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia Analisis Data Susenas 1999-2005*.
- Astuti, N. F. (2021). *Pengertian Inflasi Menurut Para Ahli, Berikut Penyebab dan Cara Mengatasinya*.
- Azwai, P. C., Muhammadinah, & Anggraini, J. (2019). *Modul Praktikum Statistik*. Rafah Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jawa Timur. *Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju*, 01, 1–12. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2022/03/01/924/luas-panen-padi-di-tahun-2021-mencapai-sekitar-66-27-ribu-hektar-dengan-produksi-sebesar-244-68-ribu-ton-gkg-.html>
- Bappeko Surabaya. (2010). *RPJPD 2005-2025*.
- BKP. (2014). *Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013*.
- Blanchard, O., & Johnson, D. (2013). *Makroekonomi* (Edisi 6). Penerbit Erlangga.
- BPS. (2021). *Jumlah Kendaraan Bermotor yang Didaftarkan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur (unit), 2018-*

2020.

BPS. (2022). *Inflasi*.

BPS. (2023). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022* (Issue 01).

BPS Jatim. (2002). *Desember 2001, Inflasi Surabaya 2,38% dan Nasional 1,62%*.

BPS Jatim. (2005). *Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan Per Kabupaten/kota (Rupiah), 2001-2004*.

<https://jatim.bps.go.id/indicator/5/373/1/pengeluaran-perkapita-sebulan-kelompok-bukan-makanan-per-kabupaten-kota.html>

BPS Jatim. (2022). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2022*.

BPS Kota Surabaya. (2022a). Kota Surabaya Dalam Angka 2022. *BPS Kota Surabaya*, 4(1), 1–27. <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-surabaya-2013.pdf>

BPS Kota Surabaya. (2022b). *Statistik Daerah Kota Surabaya 2022*.

BPS Kota Surabaya. (2023). *Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Pengeluaran (Persen), 2020-2022*. <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/155/189/4/laju-pertumbuhan-pdrb-kota-surabaya-menurut-pengeluarana.html>

BPS Surabaya. (2021a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2021*.

BPS Surabaya. (2021b). *Statistik Daerah Kota Surabaya 2021*.

BPS Surabaya. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022*.

Damanik, K. I., & Sasongko, G. (2010). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Universitas Kristen Satya Wacana.

Darmoyo, D. (2020). Pengertian Dasar Data, Informasi, Sistem dan Sistem Informasi. *STIE IGI Jakarta*, 1–10.

Dumairy. (2004). *Perekonomian Indonesia* (5th ed.). Erlangga.

Ermawati, T., & Sarana, J. (2018). Determinan Perilaku Konsumsi Pangan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dan Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(2), 69–87. <https://doi.org/10.14203/jep.25.2.2017.69-87>

Ermija Oktavia, N., & Amri. (2017). Analisis Kausalitas Antara Inflasi Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 2(1), 164–175.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hadijah. (2022). *Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM Bisa Rendah, Asal...*
- Hasan, I. (2006). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Haslina, R. (2018). Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Hermawan. (2006). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM*. 1–103.
- Hrp, G. R., & Aslami, N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1464–1474.
- Ibnu. (2021). *Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis dan Dampaknya untuk Perekonomian*.
- Irianto, A. (2007). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Kencana.
- Iryanto, M. S., & Moeis, J. P. (2021). Dampak Perubahan Harga Energi Terhadap Konsumsi Energi Rumah Tangga Di Indonesia. *Musamus Journal of Economics Development*, 4(1), 26–33.
- Juliansyah, N. (2012). *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Junaidi. (2013). *Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews*.
- Kementerian ESDM. (2008). *Indonesia Keluar Dari OPEC*.
<https://migas.esdm.go.id/post/read/Indonesia-Keluar-dari-OPEC>
- Kementerian ESDM. (2018). *Penetapan Harga BBM Pertimbangkan Keuangan Negara dan Daya Beli Masyarakat*.
- Kementerian ESDM. (2022a). *Konflik Rusia Ukraina Berlanjut ICP Maret 2022 Terkerek Lagi Jadi US\$113,50 Per Barel*.
<https://migas.esdm.go.id/post/read/konflik-rusia-ukraina-berlanjut-icp-maret-2022-terkerek-lagi-jadi-us-113-50-per-barel>
- Kementerian ESDM. (2022b). *Konsumsi Peralite Capai 23 Juta KL, Paling*

Mulyani, S. (2015). *Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.

- Nugroho, H. (2005). *Apakah Persoalan pada Subsidi BBM? Tinjauan Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*. Badan Perencanaan Nasional.
- Nurhasibah. (2021). Analisis Pola Perbandingan Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Kaya dan Miskin di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar. In *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Pemkot Surabaya. (2021). *Statistik Sektor Kota Surabaya Tahun 2021*.
- Perdana, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. In *Lab Kom Manajemen Fe Ubb*.
- Perwali Surabaya. (2017). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018*.
- Perwali Surabaya. (2022). *Perubahan RKPD Pemerintah Kota Surabaya* (Vol. 1965).
- Perwitasari, A. S. (2023). *Kenaikan Harga BBM Jadi Salah Satu Faktor Penahan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga*.
- Philip, K., & Armstrong, G. (2014). *Principles Of Marketing* (Edisi 14). Pearson Education.
- Pigome, D., Pesiwarissa, E. L., & W., L. K. A. (2019). Pengaruh Harga Peralite Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Spbu Karang Tumaritis Pt. Tri Tunggal Sakti Cemerlang Di Kabupaten Nabire. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Ragandhi, A. (2012). Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.
- Rahmawati, L., Badriati, B. el, & Tanjung, I. (2018). Analisis Permintaan dan Perilaku Konsumen Fintech Syariah Model Crowdfunding. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 2(1), 35–49.
- Riyandi, S., Mohamad, A., & Achmad. (2013). *Mulai 22 Juni 2013, Harga Premium Rp6.500 Solar Rp5.500*.

- Rizki, A. Y. (2021). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat*.
- Rubianto, R. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Rineika Cipta.
- Rudi, A. (2020). Pengujian Statistik Menggunakan SPSS. *Manajemen Dan Akuntansi*, 1–44.
- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/268>
- Samah, A. E., & Nuryati, Y. (2019). Kinerja Perekonomian Indonesia dengan Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*.
- Setiyowati, A. (2018). *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Atas Nama Rakyat 107*.
- Setyawan, D. A. (2014). *Hipotesis. Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Surakarta*, 2.
- Setyo, P. E. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen “Best Autoworks.” *PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 1(6), 755–764.
- Silalahi, R., Panggabean, P., & Siregar, S. (2018). Analisis Pengaruh Perubahan Harga Bahan bakar Minyak Premium Dan Solar Di Kota Medan. *Ilmiah Methonomi*, 4(1), 20–30.
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92.
- Stern, P. C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424.
- Sudirman, & Alhudori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal of Economics and Business*, 2(1), 81–91.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta).

- Syaifuddin. (2022). *Harga Sembako Bakal Melambung Susul Kenaikan BBM*.
<https://memorandum.co.id/harga-sembako-bakal-melambung-susul-kenaikan-bbm/>
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia.
- Tarigan, E. D. (2014). *Intervensi Pemerintah Atas Subsidi BBM dan Komitmennya dalam Kerjasama Forum G20 Sampau Masa Presidensi Rusia 2013*. Kementerian Keuangan.
- Tifada, D. A. (2022). *Efek Dua Kali Kenaikan Harga BBM Tahun 2005: Penduduk Miskin Bertambah 3,95 Juta Menurut Data BPS*.
- Tjiptono, F. (2002). *Strategi Pemasaran*. Andi.
- Tusri, Y. (2017). *Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan*. 1(1), 38–73.
- Uswah. (2022). *Indonesia Risiko Alami Inflasi Pasca Kenaikan BBM, Ini Saran Pakar Ekonomi*.
- Utari, G. A. D., Cristina, R., & Pambudi, S. (2015). Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya. *Bank Indonesia Institute*, 23, 1–64.
- Wardana, R. (2020). *Pengertian Subsidi dan Contoh Kebijakan Subsidi di Indonesia*. <https://lifepal.co.id/media/subsidi/>
- Wiranthi, P. E. (2014). Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 199–212.
- Yolandha, F. (2021). *Inflasi Kian Rendah, Konsumsi Rumah Tangga Harus Diperkuat*.
- Yuliani, D., Saryono, S., Apriani, D., Maghfiroh, & Ro, M. (2022). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320–326.